



Gambaran Umum Kondisi Daerah 2

Kota Tidore Kepulauan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai kabupaten induk.

Kota Tidore Kepulauan memiliki sejarah panjang perjalanan pemerintahan yang berakar dari sistem ketatanegaraan Kesultanan yang telah dimulai sejak fase pemerintahan “*Kolano se i rayat*” (penguasa bersama rakyat) hingga sistem pemerintahan “*Kolano se ibobato Dunya se Akhirat*” (Sultan bersama staf urusan dunia/pemerintahan dan urusan akhirat/agama) yang telah berlangsung sejak kurang lebih 900 tahun lalu.

Sejak zaman Sultan Syaifuddin atau Jou Kota, sistem pemerintahan dibagi atas dua bagian yakni; (1). Pemerintahan Pusat Kesultanan, sebagai Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Soasio yang dikepalai oleh Sultan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan; dan (2). Pemerintahan Wilayah Kesultanan, yang terdiri adalah wilayah-wilayah yang berada luar aktifitas pemerintahan pusat kesultanan dan disebut “*Nyili-nyili*”, yang dapat disamakan dengan wilayah provinsi kerajaan. “*Nyili-nyili*” tersebut adalah “*Nyili Seba-seba* (pulau Tidore dan Halmahera bagian depan yaitu Oba Utara, Oba Tengah, oba dan Oba Selatan), sedangkan “*Nyili Iofa-IOfo*” meliputi Wasile Maba, Weda, Patani, Gebe. Dan *Nyili Gulu-gulu* meliputi kepulauan Raja Ampat, *Papua Gam Sio* (Sembilan Negeri di Papua) se *Ma for Soa Raha*, termasuk Seram Timur, Kei dan Aru atau pulau-pulau tenggara jauh.

Kesultanan Tidore ini merupakan salah satu dari empat kesultanan besar di Maluku dan Maluku Utara yang dikenal dengan *Moloku Kie Raha*, yakni Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Diaman dalam sejarahnya, keempat kesultanan tersebut berasal dari satu garis keturunan.

Sistem pemerintahan kesultanan di Tidore bersandar kepada landasan idiil yang disebut dengan “*Madarifa Papa se Tete, Madofolo Dzikrullah*” (adat bersendikan agama, agama bersendikan kitabullah). Dengan landasan falsafah pemerintahan dimaksud

melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang memegang teguh *adat se atoran* sebagai prinsip dasar hubungan sosial.

Bahasa daerah yang dominan dipakai masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari adalah bahasa Tidore. Walau demikian, beragamnya suku yang ada di Kota Tidore Kepulauan, terdapat pula bahasa daerah lainnya yang digunakan dalam interaksi sosial, seperti bahasa Ternate, Makian dan bahasa Sangihe (Sangir), Jawa, Bugis, Makassar dan Buton.

Masyarakat Kota Tidore Kepulauan hidup dalam keseharian, hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotong royong. Dan itu sudah menjadi ritme kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan sosial tersebut sudah terlembagakan dalam istilah-istilah budaya lokal seperti : *Mayae*, yakni tolong-menolong. Istilah ini biasa dipakai untuk pembabatan kebun atau pembangunan rumah. Ada juga istilah *mabari* atau *morong*, dan *glasi* yang artinya sama dengan gotong-royong atau tolong-menolong.

Sejarah mencatat bahwa Tidore pada masa lampau merupakan kota bandar internasional yang menjadi salah satu pusat kawasan rempah dunia bersama Ternate, Moti, Bacan dan lainnya yang secara mundial dikenal sebagai Dunia Maluku. Tidore sebagai bagian dari kepulauan Maluku pada saat itu menjadi titik temu dan perkenalan nusantara dengan dunia luar bermula. Perdagangan rempah-rempah telah menempatkan kepulauan Maluku sebagai bandar niaga penting dunia yang telah tercatat sejak periode Dinasti Tang pada abad ke-7 (618-907 M).

Rempah-rempah jugalah yang memicu persaingan ekspedisi maritim Eropa untuk datang ke Maluku. Ekspedisi Ferdinand Magellan dan dilanjutkan oleh Juan Sebastian de Elcano yang tiba di Tidore pada 8 November 1521 hingga saat ini dicatat sebagai ekspedisi maritim Eropa yang paling penting, karena pertama kali berhasil melakukan pelayaran mengelilingi dunia dan sekaligus membuktikan bahwa bentuk bumi adalah bulat.

Tidore juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berdedikasi dan kontribusinya dalam pentas sejarah Indonesia, seperti Sultan Malikiddin Mansyur Kaicil Maluku, Sultan Syaifuddin Iskandar Zulkarnain atau Jou Kota. Dan yang paling terkenal secara nasional adalah Sultan Saidul Jihad el Ma'bus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan atau dikenal dengan Sultan Nuku (1738 – 1805), yang mana sejarah perlawanannya terhadap Belanda telah diakui, sehingga dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Selain itu, ada Sultan Ahmadul Mansyur Sirajuddin yang menjadi salah satu peletak dasar gagasan toleransi antar umat beragama dengan mengirimkan beberapa *bobato* (Menteri) Kesultanan Tidore untuk mendampingi perjalanan Otto-Geisler dari Misi Jesuit untuk misi Perkabatan Injil di tanah Papua (Mansinam/Manokwari).

Nama penting lainnya adalah "Tuan Guru" Imam Abdullah Ibnu Qadhi Abdussalam (1712 – 1807), seorang tokoh yang gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda sehingga ditangkap dan diasingkan ke penjara Ruben Island di Cape Town Afrika Selatan. Di benua Afrika, Tuan Guru melakukan dakwah syiar islam, membangun masjid awwal dan mendirikan shalat jumat pertama disana, menulis kitab dan mendirikan sekolah madrasah bagi kalangan budak. Karena jasanya beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan.



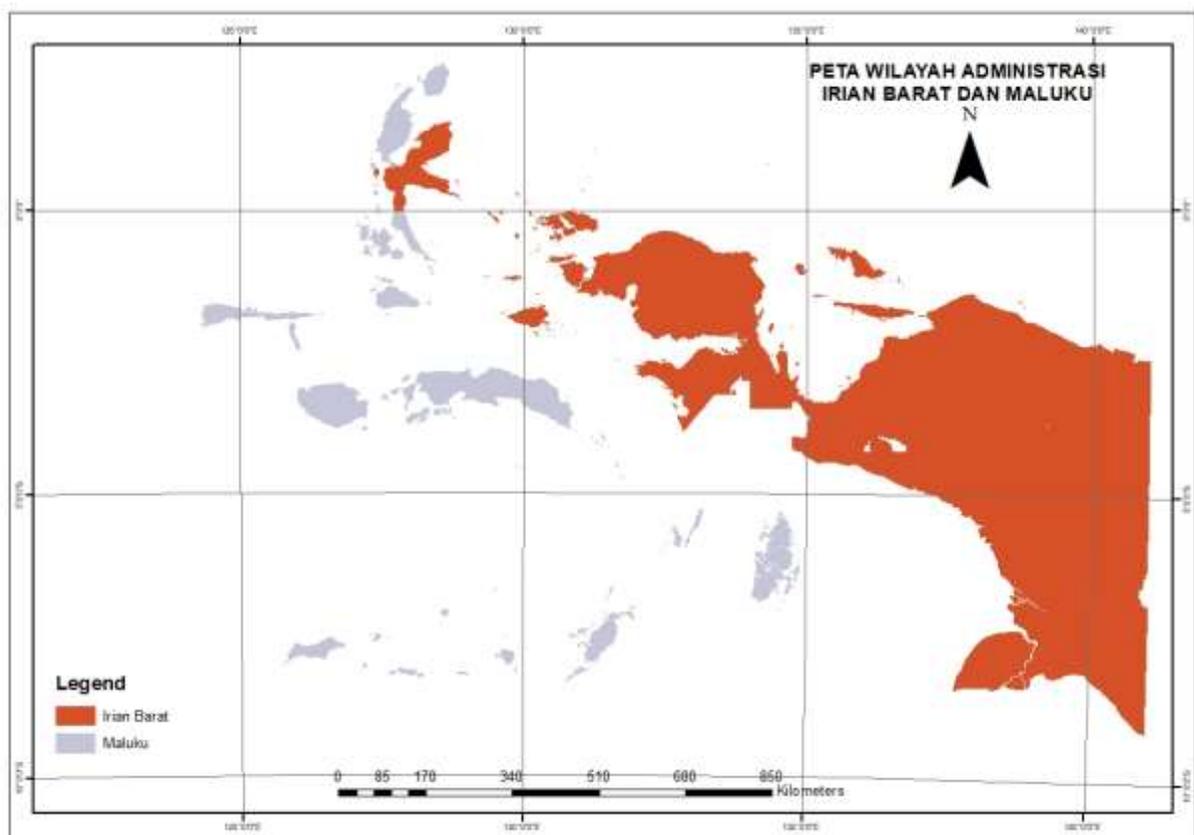
(a)



(b)

Gambar 2.1

(a) Sultan Nuku; dan (b) Sultan Zainal Abidin Syah



Gambar 2.2

Peta Wilayah Administrasi Irian Barat Saat Tidore Menjadi Ibukota Provinsi

Selanjutnya adalah Sultan Zainal Abidin Syah, yang pada masanya memiliki jasa yang besar karena berhasil memperjuangkan Irian Barat sebagai wilayah Kesultanan Tidore untuk masuk menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidore sebelum masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara dan sebelumnya Provinsi Maluku, adalah bagian dari wilayah administrasi Irian Barat sekaligus pernah menjadi Ibukota Irian Barat yang pertama pada tahun 1956 dan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur yang pertama, masa jabatan 1956 - 1961.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan berbatasan dengan Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat di sebelah utara. Pada bagian Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate, di sebelah timur berbatasan dengan dengan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Pada bagian barat, berbatasan dengan Laut Maluku. Atau secara astronomis berada antara 0°47'20,92" LU dan 127°37'7,02" BT sampai dengan 0°1'27,56" LS dan 127°47'47,42" BT, serta antara 0°34'21,78" LU dan 127°49'53,79" BT sampai dengan 0°43'57,99" LU dan 127°21'43,03" BT.

Wilayah Kota Tidore Kepulauan meliputi sebagian daratan pulau Halmahera dan 16 pulau yang masuk dalam kategori pulau kecil seperti : Tidore, Maitara, Mare, Failonga, Sibul, Woda, Raja, Guratu, Tameng, Joji, Taba/Tawang, Pasi Raja/Pasi Lamo, Pasi Kene, Doyado Madola, Sosa Gamgau 1, dan Sosa Gamgau 2. Total luas wilayahnya adalah ±2.875,09 km² yang terdiri dari daratan dengan luas ±1.703,16 km² dan lautan dengan luas ±1.171,93 km², serta memiliki panjang garis pantai ±245,38 km.

Wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan terbagi atas 8 kecamatan, 40 kelurahan dan 49 desa.

Tabel 2.1. Luas Wilayah serta Jumlah Kelurahan dan Desa Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas		P. Garis Pantai (km)	Kelurahan	Desa	Jumlah
		Km2	Ha				
1	Tidore	24,26	2.426,00	7,77	13	-	13
2	Tidore Utara	44,11	4.411,66	21,59	10	4	14
3	Tidore Selatan	28,86	2.886,44	29,41	6	2	8
4	Tidore Timur	29,43	2.943,33	18,53	7	-	7
5	Oba Utara	331,61	33.161,97	35,30	2	11	13
6	Oba Tengah	619,39	61.939,23	45,09	1	13	14
7	Oba	431,00	43.100,75	60,90	1	12	13
8	Oba Selatan	194,47	19.447,30	26,79	-	7	7
	Jumlah	1703,16	170.316,68	245,16	40	49	89

Sumber : Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2021)

Tabel 2.2. Pulau-pulau Kecil di Kota Tidore Kepulauan

No	Nama Pulau	Luas (Ha)	Keliling (m)	Keterangan
1	Tidore	11.750,55	53.683	Berpenghuni
2	Maitara	275,19	6.512	Berpenghuni
3	Mare	609,38	12.478	Berpenghuni
4	Pasi Raja/Lamo	18,02	2.464	Tidak Berpenghuni
5	Pasi Kene	13,27	2.353	Tidak Berpenghuni
6	Failonga	0,81	355	Tidak Berpenghuni
7	Doyado Madola	0,12	152	Tidak Berpenghuni
8	Sosa Gamgau 1	0,01	33	Tidak Berpenghuni
9	Sosa Gamgau 2	0,01	30	Tidak Berpenghuni
10	Sibu	7,81	1.467	Tidak Berpenghuni
11	Woda	43,73	2.752	Tidak Berpenghuni
12	Raja	18,10	2.128	Tidak Berpenghuni
13	Guratu	19,54	1.764	Tidak Berpenghuni
14	Tameng	37,31	2.666	Tidak Berpenghuni
15	Joji	20,98	1.718	Tidak Berpenghuni
16	Tawang/Taba	30,01	2.374	Tidak Berpenghuni

Sumber : Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2021)



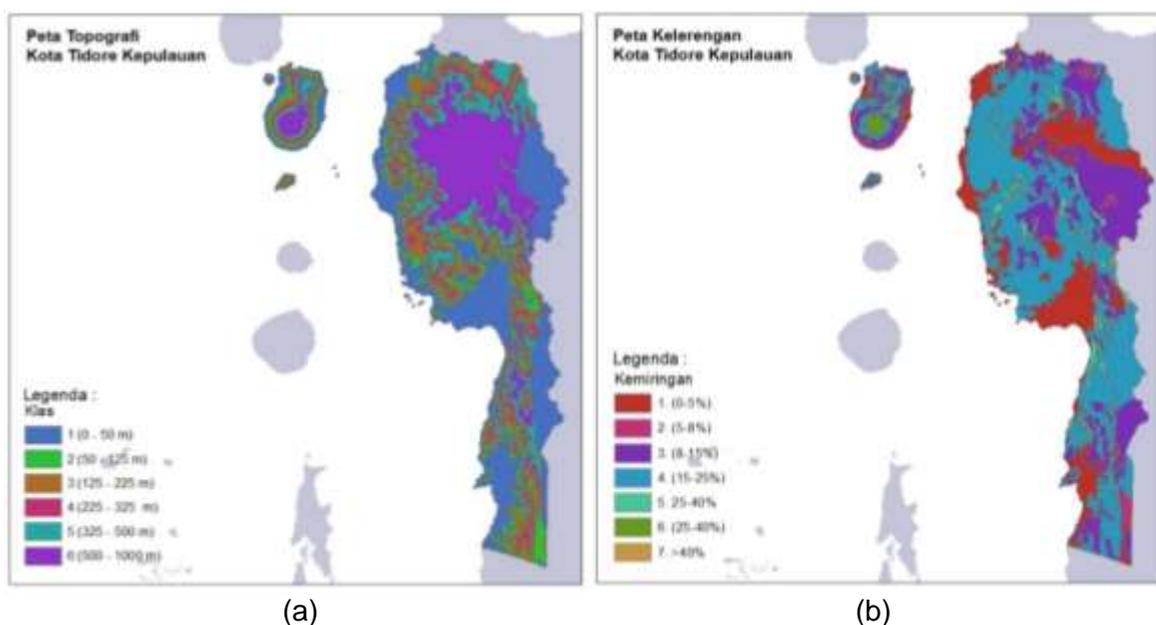
Gambar 2.4
Peta Batas Kelurahan/ Desa Se Kota Tidore Kepulauan

2.1.2 Topografi

Daerah Kota Tidore Kepulauan secara fisiografi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentukan utama, yaitu pada daerah Pulau Tidore dan Pulau Halmahera. Pulau Tidore memiliki satuan bentukan asal Gunungapi. Satuan ini memiliki kelerengannya bervariasi mulai dari 2% hingga lebih dari 40%, hal ini sesuai dengan jenis bentukan asal satuan vulkanik. Sedangkan untuk bagian ke dua wilayah Kota Tidore Kepulauan yang berada pada daratan Pulau Halmahera memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pulau Tidore. Satuan geomorfologi ini antara lain adalah dataran alluvial, perbukitan denudasional, perbukitan denudasional ultramafik, plato dan monoklin.

Dilihat dari topografi tiap pulau, maka hanya Pulau Tidore yang memiliki topografi yang tajam dibandingkan dengan tiga gugusan pulau terdekatnya, yaitu berkisar antara 15 – 40 % dan bahkan sebagian > 40 %. Daerah-daerah yang mempunyai topografi datar sampai landai di Pulau Tidore dapat ditemui di Kelurahan Dowora, sebagian Kelurahan Indonesiana, Rum, Ome.

Topografi/kemiringan tanah di Kota Tidore Kepulauan bervariasi antara 0- 2%, 2 - 15%, 15 - 40%, banyak tersebar di pinggiran pantai pulau. Kondisi tekstur tanah di Kota Tidore Kepulauan sebagian besar memiliki ciri halus sampai sedang, sedikit berpasir memberikan kemampuan drainase yang cukup baik dilihat dari sifat porositas tanah yang menyerap air.



Gambar 2.5
(a) Peta Topografi; dan (b) Peta Kelerenghan Kota Tidore Kepulauan

Tabel 2.3. Kelas Topografi Kota Tidore Kepulauan

No	Kelas Topografi	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	(0 - 50 m)	532,09	31,24
2	(50 - 125 m)	193,31	11,35
3	(125 - 225 m)	226,13	13,28
4	(225 - 325 m)	170,9	10,03
5	(325 - 500 m)	232,5	13,65
6	(500 - 1000 m)	348,23	20,45
	Total	1703,16	100,00

Sumber : Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2021)

Tabel 2.4. Kelas Kelerengan Kota Tidore Kepulauan

No	Kelerengan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	(0-5%)	330,23	19,39
2	(5-8%)	46,66	2,74
3	(8-15%)	440,38	25,86
4	(15-25%)	787,78	46,25
5	(25-40%)	84,82	4,98
6	(25-40%)	10,63	0,62
7	(>40%)	2,66	0,16
	Total	1703,16	100,00

Sumber : Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2021)

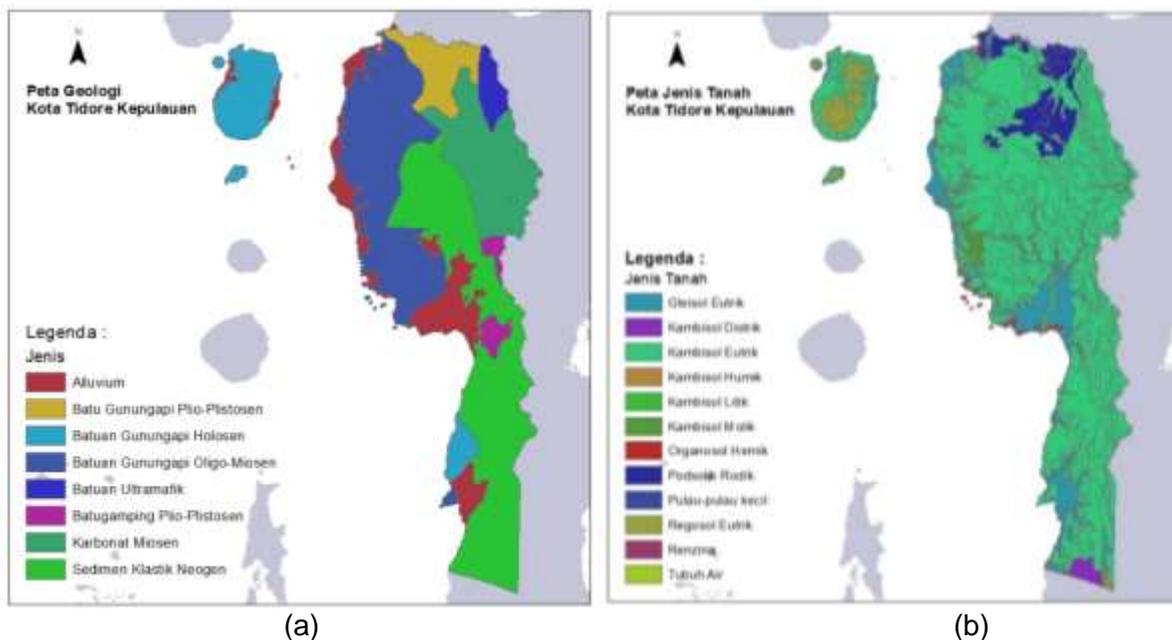
2.1.3 Geologi

Sejarah pembentukan batuan di Kota Tidore Kepulauan adalah dimulai pada Oligosen, yaitu dengan diendapkannya batuan Gunungapi formasi bacan. Formasi ini terdiri dari batuan Gunungapi berupa lava, breksi dan tufa dengan sisipan batupasir dan konglomerat. Beberapa singkapan tampak jelas kontak antara batupasir dan konglomerat, kontak ini menunjukkan adanya bidang erosi.

Satuan batuan Gunungapi muda sering juga disebut sebagai satuan batuan Gunungapi holosen yang merupakan endapan dari Gunungapi Kiematubu. Terdiri dari breksi Gunungapi, lava, tufa dan abu vulkanik. Breksi gunungapi terdiri dari andesit piroksen, kelabu tua, kompak ukuran butir daro 3 hingga 100 cm, Batu apung; putih kecoklatan, ringan, amidaloidal, dan getas.

Struktur geologi daerah Kota Tidore Kepulauan yang berkembang adalah sesar. Sesar banyak dijumpai di Pulau Halmahera. Sesar ini berkembang dari Barat Laut - Tenggara dan Timur Laut – Barat Daya. Jenis sesar agak sulit diidentifikasi di lapangan, bidang sesar yang dijumpai di lapangan berupa zona hancuran, pada zona ini dijumpai filit dan tampak mineral pengisi rekahan.

Kemiringan lapisan secara umum adalah ke arah barat, akan tetapi beberapa tempat dijumpai kemiringan ke arah utara. Besar kemiringan batuan berkisar antara 10° hingga 30°. Struktur sesar merupakan daerah yang rawan terjadi gerakan tanah. Kejadian gerakan tanah ini terutama pada saat hujan turun dan juga jika terjadi gempa.



Gambar 2.6
(a) Peta Geologi dan (b) Peta Jenis Tanah Kota Tidore Kepulauan

Secara umum jenis tanah di Kota Tidore Kepulauan adalah Kambisol Gleik, Kambisol Eutrik, Kambisol Humik, Kambisol Litik, Kambisol Distrik, Kambisol Molik, Organosol Hemik, Regosol Eutrik, Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Mediteran Haplik, Oksisol Eutrik, Podsolik Haplik, dan Renzina.

Tabel 2.5. Jenis Tanah Kota Tidore Kepulauan

No.	Jenis Tanah 1	Jenis Tanah 2	Luas (km2)
1	Gleisol Eutrik	Gleisol Eutrik	166,68
2	Gleisol Eutrik	Kambisol Gleik	0,18
3	Kambisol Distrik	Kambisol Humik	16,46
4	Kambisol Eutrik	Kambisol Eutrik	413,34
5	Kambisol Eutrik	Kambisol Gleik	48,39
6	Kambisol Eutrik	Kambisol Humik	9,94
7	Kambisol Eutrik	Kambisol Litik	734,12
8	Kambisol Eutrik	Mediteran Haplik	0,01
9	Kambisol Eutrik		114,10
10	Kambisol Humik	Regosol Eutrik	2,77
11	Kambisol Litik	Oksisol Eutrik	0,00
12	Kambisol Molik	Kambisol Eutrik	15,45
13	Organosol Hemik	Aluvial Gleik	12,29
14	Podsolik Rodik	Podsolik Haplik	114,77
15	Pulau-Pulau Kecil		0,00
16	Regosol Eutrik	Kambisol Eutrik	47,55
17	Renzina	Kambisol Eutrik	0,00

No.	Jenis Tanah 1	Jenis Tanah 2	Luas (km2)
18	Tubuh Air		7,12
	Total		1703,16

Sumber : Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2020)

Tabel 2.6. Jenis Batuan di Kota Tidore Kepulauan

No.	Geologi	Kode	Luas (km2)
1	Alluvium	Qa	177,22
2	Batugamping Plio-Plistosen	QTs	34,60
3	Batu Gunungapi Plio-Plistosen	QTv	96,64
4	Batuan Gunungapi Holosen	Qv	148,09
5	Karbonat Miosen	Tml	237,83
6	Sedimen Klastik Neogen	Tns	552,33
7	Batuan Gunungapi Oligo-Miosen	Tomv	416,80
8	Batuan Ultramafik	Um	39,65
	Total		1703,16

Sumber : Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2020)

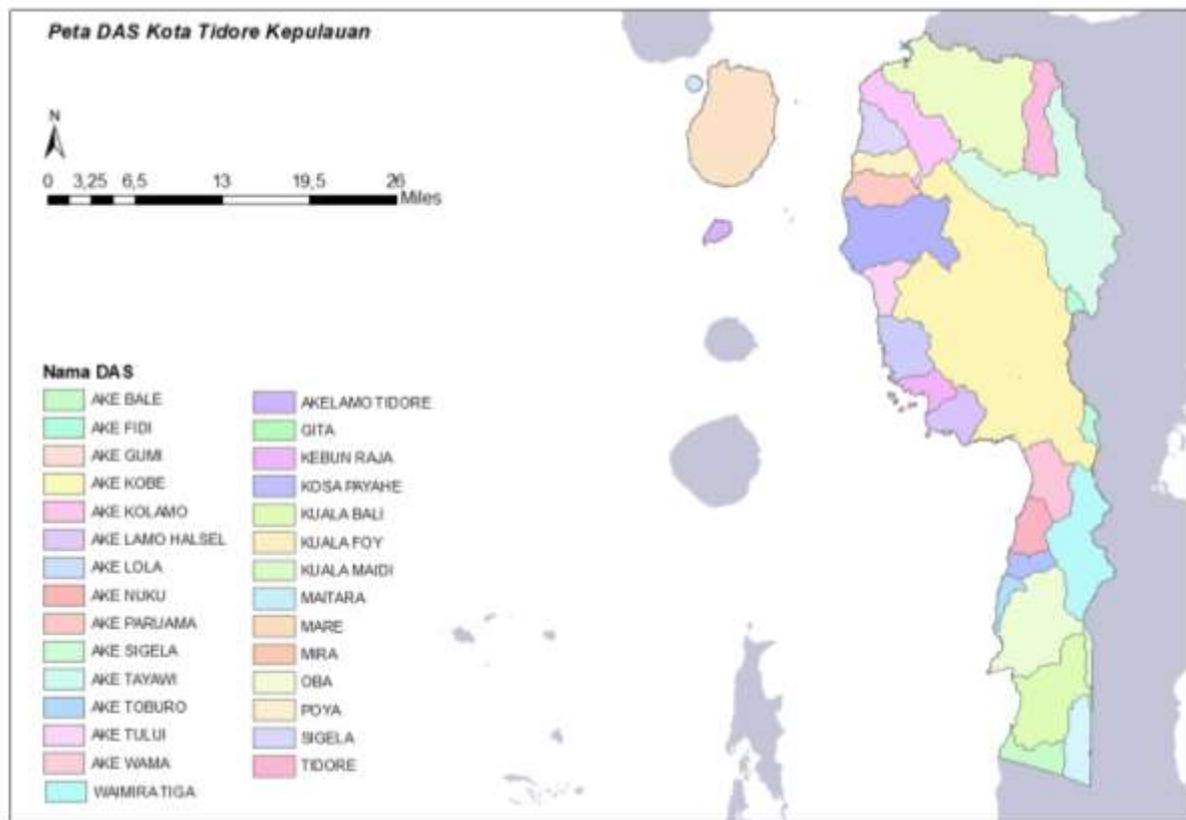
2.1.4 Hidrologi

Data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDAS-HL) Akemalamo, daerah Kota Tidore Kepulauan juga dibagi atas 29 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.7. DAS Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan

No	Nama DAS	Luas (Ha)	No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Akebale	3682,78	16	Gita	1944,79
2	Ake Fidi	1341,89	17	Kebun Raja	10,87
3	Ake Gumi	2095,05	18	Kosa Payahe	2373,12
4	Ake Kobe	19356,22	19	Kuala Bale	57,71
5	Ake Kolano	16852,97	20	Kuala Foy	8043,36
6	Akelamo Halsel	2922,26	21	Kuala Maidi	8825,50
7	Ake Lola	3830,33	22	Maitara	288,90
8	Ake Nuku	2181,52	23	Mare	607,68
9	Ake Paruama	4167,07	24	Mira	2515,25
10	Ake Sigela	1409,59	25	Oba	5848,89
11	Ake Tayawi	44936,58	26	Foya	537,63
12	Ake Toburo	2882,54	27	Sigela	943,42
13	Ake Tului	2913,42	28	Tidore	11847,16
14	Ake Wama	7576,91	29	Waimira Tiga	2056,77
15	Akelamo Tidore	9247,28			

Sumber : Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2020)



Gambar 2.7
Peta DAS di Kota Tidore Kepulauan

2.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah Kota Tidore Kepulauan seperti umumnya daerah kepulauan di Indonesia, dimana iklimnya sangat dipengaruhi oleh angin laut. Jumlah curah hujan tahun 2018 – 2020 berkisar 1771,87 – 2373,00 mm/tahun.

Klasifikasi iklim di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Schmidt–Ferguson yang mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. (Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm). Maka iklim di Kota Tidore Kepulauan termasuk dalam iklim tipe B atau basa dengan nilai Q antara 0,143 – 0,333.

Sementara iklim Kota Tidore Kepulauan berdasarkan kriteria Oldeman yang juga menggunakan dasar yang sama dengan penentuan iklim menurut Schmidt-Ferguson, yaitu unsur curah hujan. Dalam metode ini, dasar penentuan bulan basah, bulan lembap, dan bulan kering sebagai berikut. Dikatakan Bulan basah, apabila curah hujannya > 200 mm. Bulan lembap, apabila curah hujannya 100–200 mm. Dan bulan kering, apabila curah hujannya < 100 mm.

Tabel 2.8. Curah Hujan Setiap Bulan Tahun 2018-2020 (mm³)

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	177,83	161,83	77
Februari	190	76,92	155
Maret	225,50	60,92	121
April	295,83	219,83	399
Mei	279,83	188,17	112
Juni	196,50	327,83	201
Juli	210,50	298,92	253
Agustus	42,50	103,83	173
September	82,33	44,83	258
Oktober	112,67	219	193
November	152,67	2,70	285
Desember	239	67,08	146
Total	2205,17	1771,87	2373,00
Rata-Rata	183,76	149,52	197,75

Sumber : Kantor BMKG Ternate, 2020

Tabel 2.9. Curah Hari Hujan Setiap Bulan Tahun 2018-2020

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	15	14	12
Februari	14,83	8,67	15
Maret	14,00	5,17	16
April	16,17	11,00	14
Mei	17,50	10,67	14
Juni	15,33	18,83	20
Juli	14,67	19,17	24
Agustus	8,50	12,50	19
September	8,83	5,33	25
Oktober	12,67	15,83	16
November	14,50	1,33	18
Desember	20,33	6,83	15
Total	172	129	208
Rata-Rata	14,36	10,78	17,33

Sumber : Kantor BMKG Ternate, 2020

Berdasarkan bulan basah, Oldeman menentukan lima klasifikasi iklim atau daerah agroklimat utama sebagai berikut :

- Iklim A : Jika terdapat lebih dari 9 bulan basah berurutan.
- Iklim B : Jika terdapat 7–9 bulan basah berurutan.
- Iklim C : Jika terdapat 5–6 bulan basah berurutan.
- Iklim D : Jika terdapat 3–4 bulan basah berurutan.

- Iklim E : Jika terdapat kurang dari 3 bulan basah berurutan.

Maka iklim Kota Tidore Kepulauan berdasarkan kriteria Oldemen masuk dalam klasifikasi iklim Tipe D. Dengan tipe seperti ini, maka tanaman pertanian yang layak untuk dikembangkan adalah jenis palawija.

Tabel 2.10. Klasifikasi iklim menurut Schmidt–Ferguson

Tipe Iklim	Nilai Q	Keterangan
A	$0 < Q < 0,143$	Sangat basah
B	$0,143 < Q < 0,333$	Basah
C	$0,333 < Q < 0,600$	Agak basah
D	$0,600 < Q < 1,000$	Sedang
E	$1,000 < Q < 1,670$	Agak kering
F	$1,670 < Q < 3,000$	Kering
G	$3,000 < Q < 7,000$	Sangat kering
H	$7,000 < Q$	Luar biasa kering

Sumber : Kantor BMKG Ternate (2020) di olah Bapelitbang (2021)

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan wilayah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan hasil evaluasi konversi lahan yang dilakukan Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 dan selanjutnya dimutakhirnya pada tahun 2020, memperlihatkan bahwa sebanyak 68,32 persen wilayah Kota Tidore Kepulauan ditutupi oleh hutan. Sebanyak 19,20 persen berupa kebun campuran. Dan lahan yang digunakan sebagai permukiman hanya sekitar 1,38 persen dari total luas wilayah. Data tersebut sebagaimana dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11. Tutupan Lahan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020

No.	Penggunaan/ Tutupan Lahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Hutan (H)	1163,7	68,33
2.	Kebun Campuran (Kc)	326,94	19,20
3.	Mangrove (M)	18,12	1,06
4.	Perkebunan (Pk)	8,04	0,47
5.	Permukiman (Pm)	23,41	1,37
6.	Persawahan (Psw)	3,87	0,23
7.	Semak Belukar (Sb)	57,85	3,40
8.	Tanah Terbuka (Tt)	0,72	0,04
9.	Tegalan (Tg)	100,51	5,90
	Jumlah	1703,16	100,00

Sumber : Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2020)

2.1.7 Kawasan Potensi Rawan Bencana

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 – 2022, terdapat 9 (sembilan) jenis bahaya yakni : banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12. Potensi Bahaya di Kota Tidore Kepulauan

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	21.406	Sedang
2	Banjir bandang	7.268	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	25.525	Tinggi
4	Gelombang ekstrim dan abrasi	3.992	Tinggi
5	Gempa bumi	174.912	Tinggi
6	Kebakaran hutan dan lahan	46.542	Tinggi
7	Kekeringan	174.912	Tinggi
8	Tanah longsor	46.899	Tinggi
9	Tsunami	4.512	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 - 2022

Tabel 2.13. Potensi Jenis Bahaya Per Kecamatan

Kecamatan	Jenis Bahaya, Luas dan Kelas								
	Banjir	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami
Tidore	530 Ha; Sedang	141 Ha; Tinggi	414 Ha; Tinggi	140 Ha; Tinggi	5.282 Ha; Tinggi	493 Ha; Sedang	5.282 Ha; Tinggi	1.665 Ha; Sedang	224 Ha; Tinggi
Tidore Utara	776 Ha; Rendah	-	818 Ha; Tinggi	371 Ha; Tinggi	3.760 Ha; Tinggi	1.833 Ha; Sedang	3.760 Ha; Tinggi	2.217 Ha; Sedang	170 Ha; Tinggi
Tidore Selatan	367 Ha; Rendah	-	716 Ha; Tinggi	412 Ha; Tinggi	4.340 Ha; Tinggi	691 Ha; Sedang	4.340 Ha; Tinggi	1.858 Ha; Sedang	125 Ha; Tinggi
Tidore Timur	263 Ha; Rendah	15 Ha; Tinggi	414 Ha; Tinggi	289 Ha; Tinggi	3.400 Ha; Tinggi	954 Ha; Sedang	3.400 Ha; Tinggi	2.149 Ha; Sedang	165 Ha; Tinggi
Oba Utara	2.783 Ha; Sedang	1.642 Ha; Tinggi	5.208 Ha; Tinggi	493 Ha; Tinggi	38.550 Ha; Tinggi	12.182 Ha; Sedang	38.550 Ha; Tinggi	9.966 Ha; Sedang	1.863 Ha; Tinggi
Oba Tengah	3.994 Ha; Rendah	2.554 Ha; Tinggi	3.538 Ha; Tinggi	789 Ha; Tinggi	42.430 Ha; Tinggi	9.968 Ha; Sedang	42.430 Ha; Tinggi	10.257 Ha; Sedang	953 Ha; Tinggi
Oba	8.155 Ha; Rendah	1.860 Ha; Tinggi	8.725 Ha; Tinggi	989 Ha; Tinggi	38.550 Ha; Tinggi	11.282 Ha; Tinggi	38.550 Ha; Tinggi	10.556 Ha; Sedang	115 Ha; Tinggi
Oba Selatan	4.536 Ha; Rendah	1.057 Ha; Tinggi	5.660 Ha; Tinggi	509 Ha; Tinggi	38.600 Ha; Tinggi	9.138 Ha; Sedang	38.600 Ha; Tinggi	8.231 Ha; Sedang	896 Ha; Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 - 2022

Kawasan potensi rawan di wilayah Kota Tidore Kepulauan meliputi :

(1) kawasan sesar;

Kawasan sesar berada di : (1) Kecamatan Oba Utara dengan luas lebih $\pm 3.236,46$ Ha; (2) Kecamatan Oba Tengah dengan luas $\pm 2.281,27$ Ha; (3) Kecamatan Oba dengan luas $\pm 273,19$ Ha; dan Kecamatan Oba Selatan dengan luas $\pm 587,58$ Ha.

(2) Kawasan potensi rawan gelombang pasang dan tsunami;

Kawasan potensi rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi:

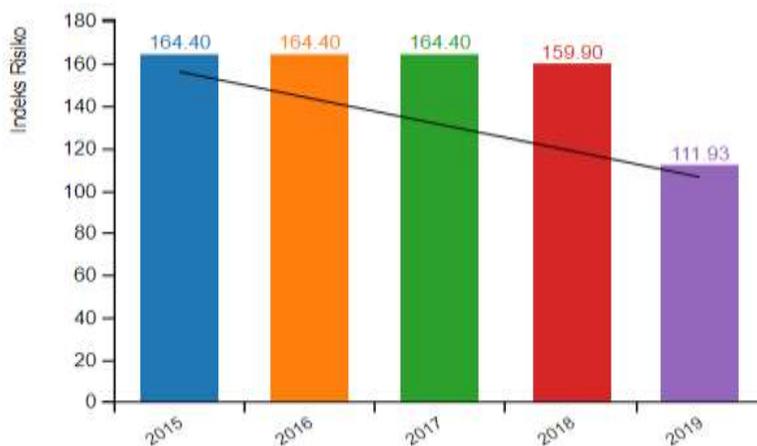
- a. Kecamatan Tidore dengan luas ± 224 Ha meliputi Kelurahan Seli, Soadara, Soasio, Gamtufkange, Indonesiana, Tomagoba, Tuguwaji, dan Goto;
- b. Kecamatan Tidore Timur dengan luas ± 165 Ha meliputi Kelurahan Cobodoe, Dowora, Doyado, Tosa, Mafututu, dan Jikocobo;
- c. Kecamatan Tidore Utara dengan luas ± 170 Ha meliputi Kelurahan Bobo, Mareku, Ome, Rum, Rum balibunga, Desa Maitara, Maitara Tengah, Maitara Utara dan Maitara Selatan;
- d. Kecamatan Tidore Selatan dengan luas ± 125 Ha meliputi Desa Marekofo, Maregam, Kelurahan Tongowai, Gurabati, Tomalou, Tuguha, Dokiri dan Toloa;
- e. Kecamatan Oba Utara dengan luas ± 1.863 Ha meliputi Somahode, Oba, Sofifi, Guraping, Kaiyasa, Kusu, Galala dan Balbar;
- f. Kecamatan Oba Tengah dengan luas ± 953 Ha meliputi Desa Togeme, Lola, Kelurahan Akelamo, Desa Akeguraci, Akesai, Aketobololo, Akedotilou, Aketubatu dan Tadupi;
- g. Kecamatan Oba dengan luas ± 115 Ha meliputi Kusu Sinopa, Payahe, Toseho, Gitaraja, Koli, Bale, Talaga Mori dan Kosa; dan
- h. Kecamatan Oba Selatan dengan luas ± 896 Ha meliputi Sela Malofo, Maidi, Hager, Wama, Lifofa, Nuku, dan Tagalaya.

(3) Kawasan potensi rawan banjir;

Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan deras, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai. Daerah rawan banjir terutama pada daerah yang berada di hilir sungai besar seperti di hilir Sungai Akelamo dan Payahe.

- a. potensi bahaya banjir dengan luas ± 21.406 Ha, yakni :
 - Kecamatan Tidore dengan luas ± 530 Ha;
 - Kecamatan Tidore Utara dengan luas ± 776 Ha;
 - Kecamatan Tidore Selatan dengan luas ± 367 Ha;
 - Kecamatan Tidore Timur dengan luas ± 263 Ha;
 - Kecamatan Oba Utara dengan luas ± 2.783 Ha;
 - Kecamatan Oba Tengah dengan luas ± 3.994 Ha;
 - Kecamatan Oba dengan luas ± 8.155 Ha; dan
 - Kecamatan Oba Selatan dengan luas ± 4.536 Ha.
- b. potensi bahaya banjir bandang dengan luas ± 7.268 Ha. Terbagi di Kecamatan Tidore (± 141 Ha), Tidore Timur (± 15 Ha), Oba Utara (± 1.642 Ha), Oba Tengah (± 2.554 Ha), Oba (± 1.860 Ha) dan Kecamatan Oba Selatan (± 1.057 Ha).

Trend Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2015 hingga saat ini mengalami penurunan. Tapi angka tersebut masih dalam kategori tinggi. Artinya, perlu ada perhatian serius untuk menurunkan angka IRB.



Gambar 2.8

Trend Indeks Risiko Bencana Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 - 2019

2.1.8 Aspek Demografi

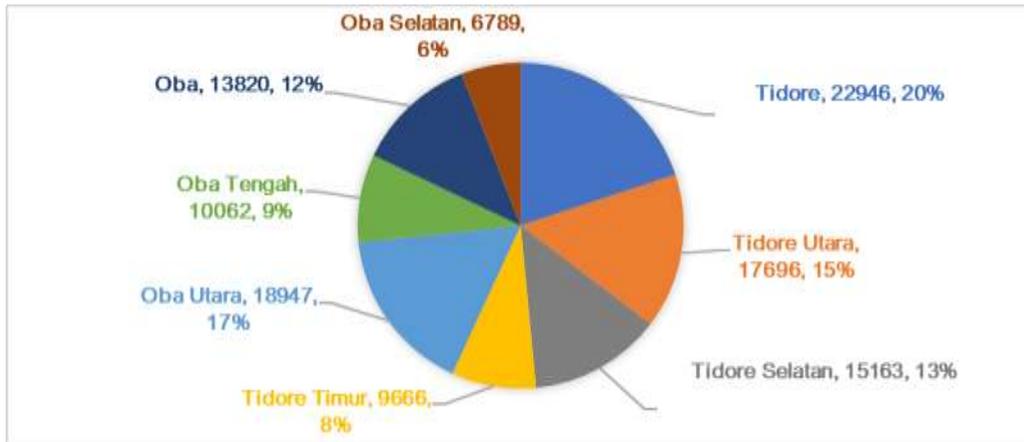
Pertumbuhan penduduk Kota Tidore Kepulauan relatif terkendali, yakni pada kurun waktu 2016-2020 rata-rata pertumbuhannya dibawah 2 persen. Atau dari 111.097 jiwa pada tahun 2016 menjadi 115.089 jiwa pada tahun 2020.

Penyebaran penduduk per kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2020 adalah di Kecamatan Tidore yakni 22.946 jiwa atau 20 persen dan terendah adalah Kecamatan Oba Selatan yakni 6.789 jiwa atau hanya 6 persen dari total penduduk Kota Tidore Kepulauan.



Gambar 2.9

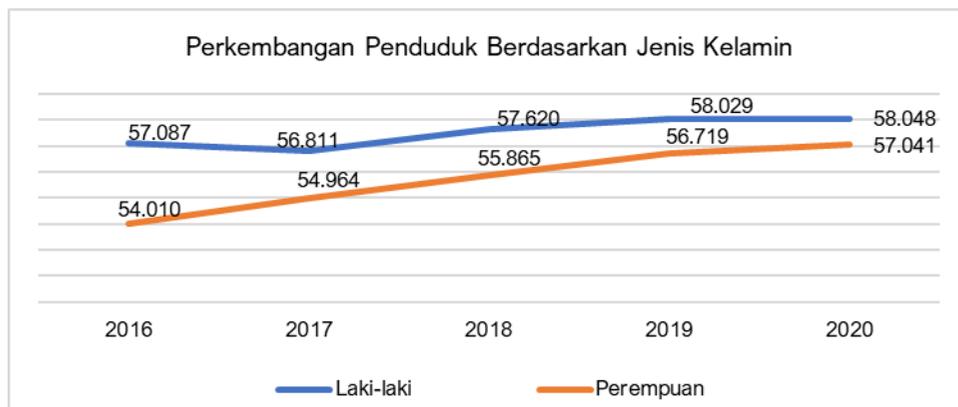
Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tidore Kepulauan, Diolah)



Gambar 2.10

Kurva Penyebaran Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tidore Kepulauan, Diolah)

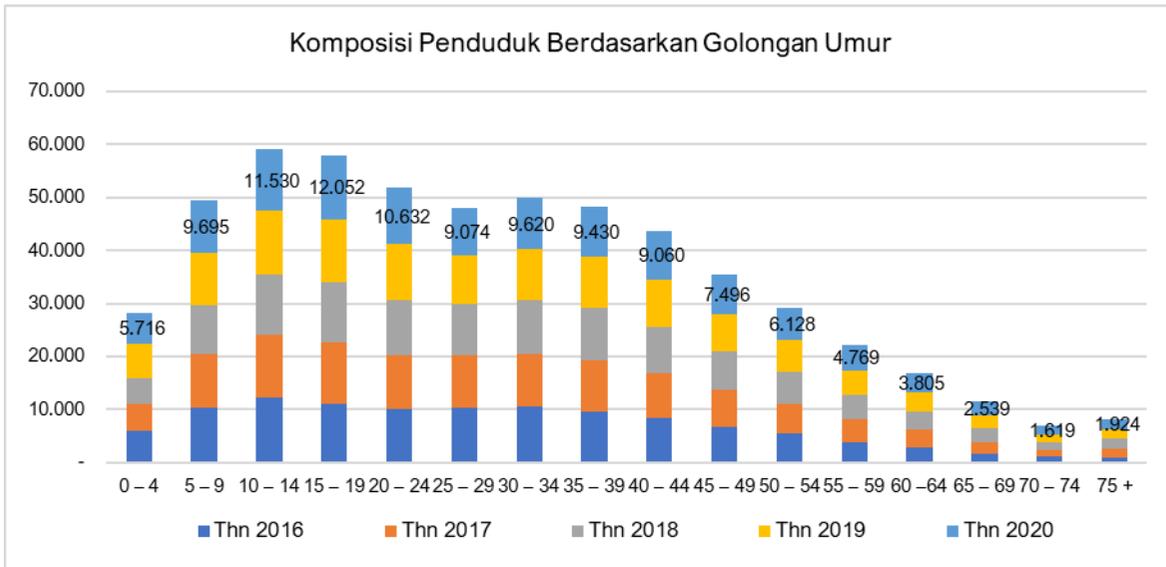
Berdasarkan jenis kelamin, perkembangan jumlah penduduk laki-laki di Kota Tidore Kepulauan lebih banyak dari perempuan. Rata-rata rasio perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 105,25.



Gambar 2.11

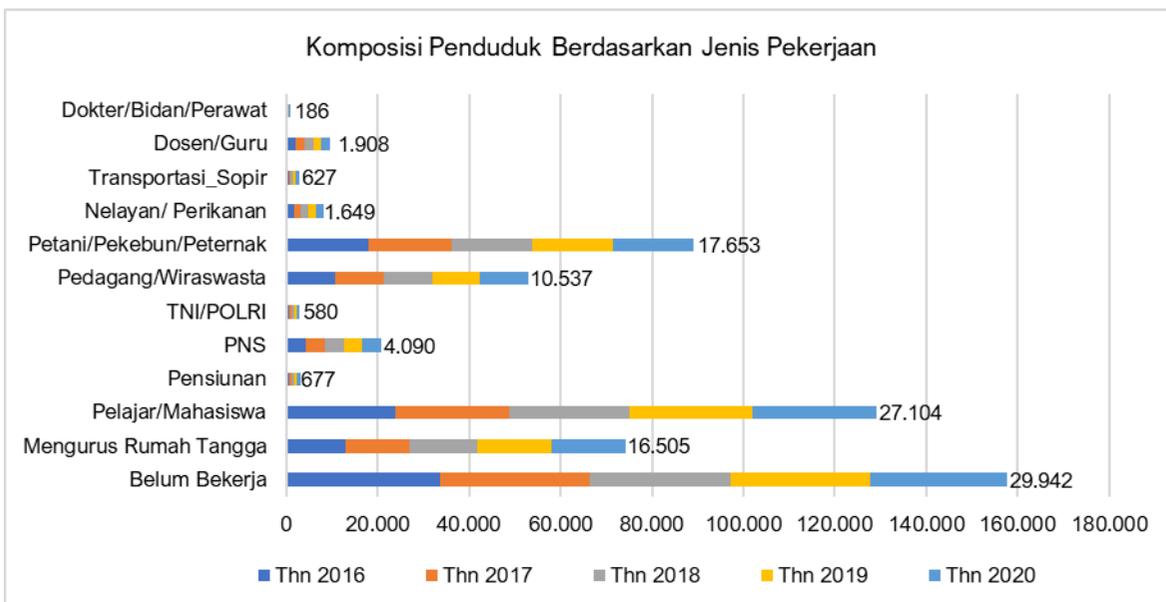
Grafik Perkembangan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tidore Kepulauan, Diolah)

Bila penduduk Kota Tidore Kepulauan dikelompokkan berdasarkan golongan umur, maka dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2020), kelompok umur 10 – 14 tahun dan 15 – 19 tahun adalah yang terbesar atau 20,6 persen dari total jumlah penduduk.



Gambar 2.12

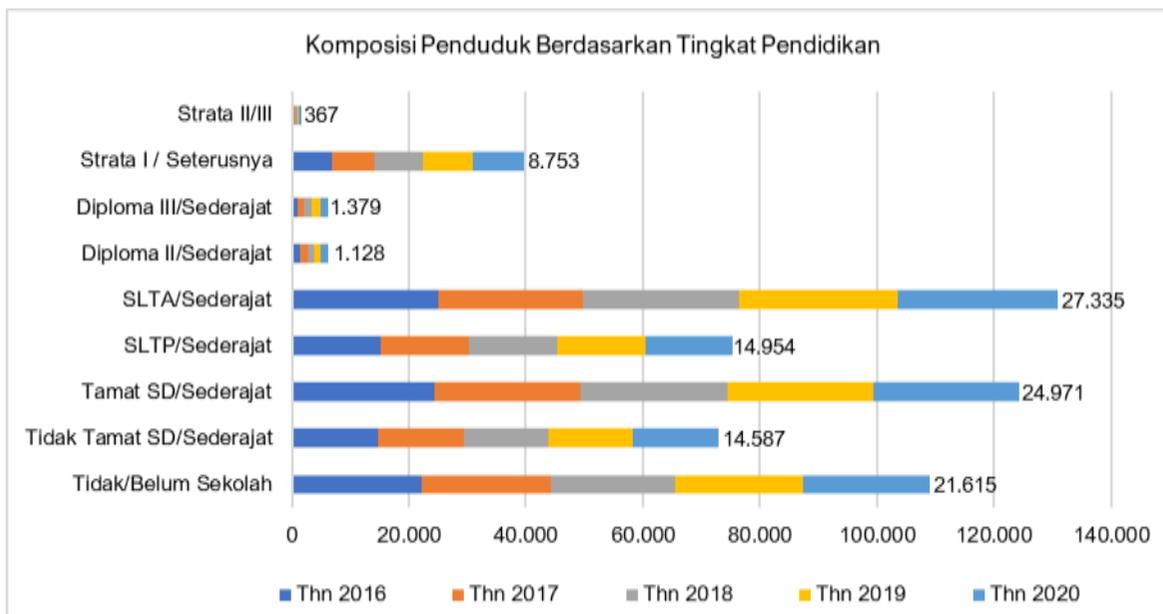
Grafik Komposisi Penduduk Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Golongan Umur
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tidore Kepulauan, Diolah)



Gambar 2.13

Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tidore Kepulauan, Diolah)

Mencermati grafik komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan tersebut, terlihat bahwa ada tiga komponen yang menonjol, yakni : pelajar/ mahasiswa, mengurus rumah tangga dan belum bekerja. Jumlah ketiga komponen ini sangat menonjol, yakni lebih dari 63 persen di tahun 2020. Dikatakan menonjol bukan saja dari jumlahnya, tapi dari sisi perekonomian daerah perlu mendapat perhatian khusus untuk bisa produktif agar dapat menunjang perekonomian di daerah.



Gambar 2.14

Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tidore Kepulauan, Diolah)

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk terbesar adalah berpendidikan SLTA/ Sederajat selanjutnya adalah Tamat SD/ sederajat dan Tidak/ Belum Sekolah. Sementara yang sarjana (strata I) hanya sekitar 7,6 persen dari total jumlah penduduk di tahun 2020.

Data yang disajikan pada Gambar 2.11, Gambar 2.12, dan Gambar 2.13 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan, akan terjadi bonus demografi di Kota Tidore Kepulauan. Pada masa itu, potensi pertumbuhan ekonomi tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia kerja lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja. Olehnya itu persiapan-persiapan menuju ke masa tersebut harus dilakukan secara benar dan matang, yakni dengan menyiapkan sumberdaya manusia yang terampil, inovatif dan memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*).

2.1.9 Potensi Sumberdaya Alam

Pertanian

Luas kawasan pertanian di Kota Tidore Kepulauan adalah 34.614 Ha dengan potensi untuk pertanian perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan peternakan. Komoditi unggulan untuk tanaman perkebunan adalah cengkeh, pala dan kelapa. Untuk hortikultura yakni pisang, mangga dan jeruk, kacang panjang, bawang, cabai dan tomat. Komoditi tanaman pangan yakni sagu dan ubi. Sementara untuk peternakan adalah sapi dan ayam.

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua PDRB Kota Tidore Kepulauan. Pengembangan sektor pertanian ini dapat disinergikan dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2019 – 2024 yang menjadikan wilayah di pulau Tidore sebagai sentra produksi hortikultura dan daratan oba sebagai sentra produksi peternakan ayam.

Kelautan dan Perikanan

Sektor ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah, karena selain memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, harga ikan utamanya tuna dan cakalang sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi di daerah. Pada sisi lain, melimpahnya ketersediaan (*stock*) sumberdaya ikan ternyata tidak berbanding lurus dengan harga jual di pasar domestik. Karena harga ikan sangat dipengaruhi oleh produksi penangkapan. Termasuk tingkat konsumsi ikan per kapita bila dibanding dengan daerah lain.

Pengembangan sektor perikanan dilakukan dengan memanfaatkan potensi perikanan tangkap di perairan Tidore dan Halmahera yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.

Kawasan potensi pengembangan perikanan budidaya meliputi : pengembangan budidaya perikanan darat di Dowora, Guraping, Koli, dan Maldi. Sementara pengembangan budidaya perikanan laut di Teluk Cobo, Pulau Mare, Pulau Sibul, Pulau Woda, Raja, Guratu, Tameng, Joji dan Desa Togeme.

Indikasi program dalam RTRW Kota Tidore Kepulauan dalam rangka menunjang sektor ini adalah pembangunan prasarana penunjang perikanan untuk meningkatkan peran sektor perikanan yakni : rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Oba atau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Oba Utara, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Goto, rencana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rum, Gurabati, Galala, Tadupi, dan Desa Wama. Termasuk kawasan pengolahan perikanan terpadu di Desa Maitara Tengah.



Gambar 2.15

Rencana Pengembangan Kegiatan Budidaya dan Prasarana Perikanan

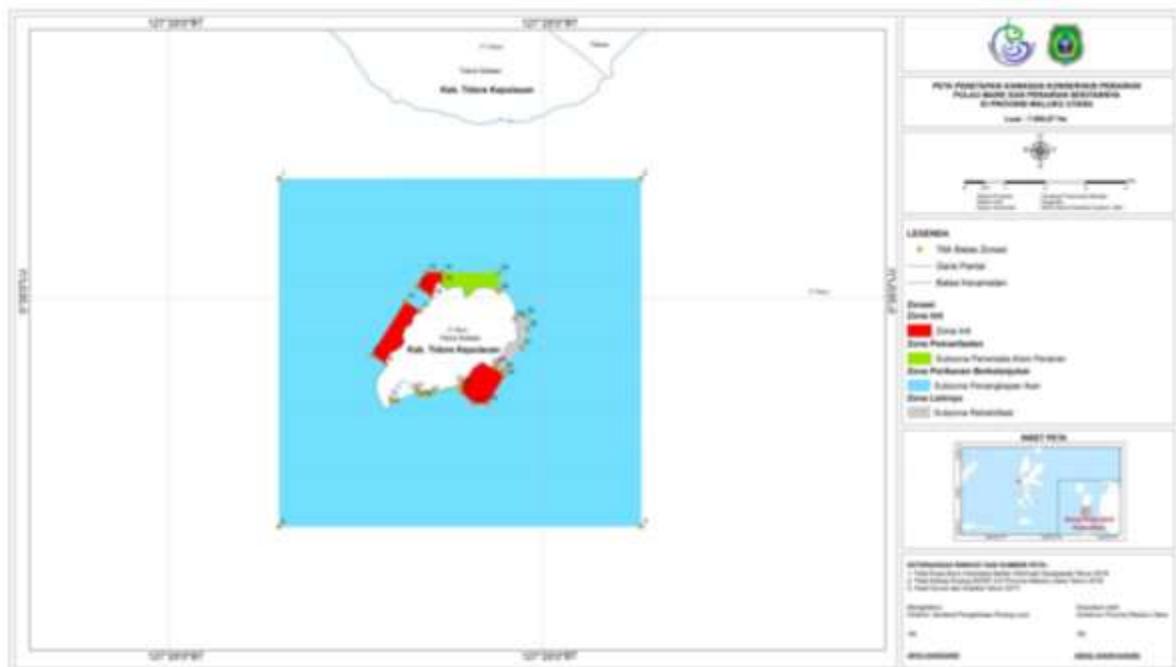
Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare

Perairan pulau Mare yang memiliki potensi perikanan, adanya habitat dan biota penting seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, ikan karang, ikan pelagis kecil, hiu sirip hitam, dan spesies dilindungi seperti lumba-lumba. Dimana hal-hal tersebut dinilai memiliki keunikan tersendiri dan berpeluang menunjang kegiatan wisata perairan yang berkelanjutan.

Pentingnya potensi sumberdaya perikanan di perairan pulau Mare tersebut untuk dijaga dan dilestarikan sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan Nomor 66/KEPMEN-KP/2020, telah menetapkannya sebagai Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) dengan luas keseluruhan 7.060,87 Ha. Luasan tersebut terbagi atas zona inti, zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan, zona perikanan perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya.

Zona inti dengan luas 155,14 Haberada di bagian barat laut dan tenggara pulau Mare. Pada bagian barat pulau, memiliki konstruksi pantai berbatu dengan kelerengan yang terjal sampai membentuk dinding (*wall*). Jenis biota penting utama yang dilindungi pada tempat ini utamanya adalah terumbu karang, ikan karang, dan hiu sirip hitam (*Carcharhinus melanopterus*).

Zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan dengan luas 61,05 Ha. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Zona ini berada di bagian utara pulau Mare. Pantainya berupa pantai berpasir putih. Ada empat ekosistem penting di tempat ini, yakni terumbu karang, lamun, mangrove dan vegetasi pantai.



Gambar 2.16

Peta Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara (Sumber : SK Nomor 66/KEPMEN-KP/2020)

Zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan dengan luas 6.811,01 Ha. Zona perikanan berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona ini adalah perairan di sekitar Pulau Mare, dimana kegiatan penangkapan ikan yang dibolehkan tetapi menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dengan kapasitas kapal perikanan di bawah 10 GT.

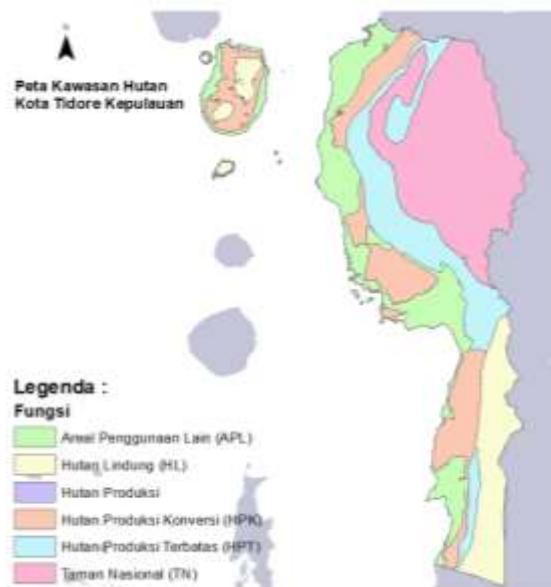
Zona lainnya berupa subzona rehabilitasi dengan luas 33,67 Ha. Zona ini berada di sebelah timur Pulau Mare atau disekitar permukiman Desa Maregam. Terumbu karang di zona ini dalam kondisi rusak.

Kawasan Hutan dan Taman Nasional Aketajawi

Kawasan hutan di Kota Tidore Kepulauan diatur melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Utara. Fungsi kawasan hutan di Kota Tidore Kepulauan terbagi atas Taman Nasional (TN), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Berdasarkan peta kawasan hutan, terlihat bahwa karakteristik Kota Tidore Kepulauan adalah kota konservasi, sebab 30,95 persen wilayahnya adalah berupa hutan konservasi atau Taman Nasional dalam hal ini Taman Nasional Aketajawe. Hutan konservasi Taman Nasional Aketajawe-Loloba dengan luas 52.722,45 Ha dengan spesies endemik burung Bidadari dan seluruh jenis burung Paruh Bengkok.

Keberadaan TN Aketajawe-Loloba ini sangat strategis untuk menjaga keberlangsungan hutan dan spesies endemik yang ada di dalamnya. Hal berpotensi dalam pengembangan ekowisata dengan menawarkan spesies endemik burung paruh bengkok sebagai daya tarik, serta alamnya dengan sungai dan air terjun yang memiliki keindahan alam mempesona.



Gambar 2.17
Peta Kawasan Hutan Kota Tidore Kepulauan

Terdapat pula hutan lindung (HL) seluas 22.556 Ha yakni HL Gunung Sinopa di Kecamatan Oba dan Oba Selatan, HL Kie Matubudi Kecamatan Tidore, Kecamatan Tidore Selatan dan Tidore Utara, HL Tagafura di Kecamatan Tidore, Tidore Utara dan Tidore Timur, HL pulau Maitara di Kecamatan Tidore Utara, HL pulau Mare di Kecamatan Tidore Selatan, HL pulau Sibul dan HL mangrove di Kecamatan Tidore Selatan dan Kecamatan Oba Tengah. Keberadaan HL ini sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan air tanah, utamanya di pulau Tidore, Maitara dan Mare sebagai pulau yang masuk dalam kategori pulau kecil yang sangat mengandalkan sumber air bersih dari air tanah.

Tabel 2.14. Fungsi dan Luasan Kawasan Hutan di Kota Tidore Kepulauan

No	Fungsi	Luas (km ²)	%
1	Taman Nasional (TN)	527,22	30,96
2	Hutan Lindung (HL)	225,56	13,24
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	0,10	0,01
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	289,84	17,02
5	Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK)	322,18	18,92
6	Areal Penggunaan Lain (APL)	338,28	19,86
	Total	1703,19	100,00

Sumber : BPKH Manado (2020) di olah oleh Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2021)

Khususnya untuk HPK, berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, terdapat 6686,95 Ha HPK non produktif yang tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15. Sebaran HPK Non Produktif se-Kota Tidore Kepulauan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Oba	2583,00
2	Oba Selatan	75,14
3	Oba Tengah	672,79
4	Oba Utara	726,09
5	Tidore	2169,65
6	Tidore Selatan	337,41
7	Tidore Timur	19,44
8	Tidore Utara	103,44
	Total	6686,95

Sumber : BPKH Manado (2020) di olah oleh Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan (2021)



Gambar 2.18

Pesona Keindahan Taman Nasional Aketajawe – Lolobata

Pertambangan

Potensi pertambangan di Kota Tidore Kepulauan antara lain pertambangan pasir, batu dan emas. Kawasan potensi peruntukan pertambangan terpusat di Desa Noramaake Kecamatan Oba Tengah. Potensi pengembangan Wilayah Usaha Pertambangan (WUT) bijih besi (Mineral Logam) berada di wilayah Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara seluas kurang lebih 8.500 Ha; nikel berada di wilayah Kecamatan Oba, Oba Tengah dan Oba Selatan seluas kurang lebih 14.685 Ha; pasir besi berada di wilayah Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan seluas kurang lebih 11.501 Ha; dan emas berada di wilayah Kecamatan Oba Tengah seluas kurang lebih 9.063 Ha.

Potensi sumber daya mineral dan bahan galian antara lain :

a). Emas(Au)

Endapan bahan galian emas terdapat di :

- Kecamatan Oba Tengah Desa Noramake, Desa Akedotilou, Desa Aketobololo dan Kelurahan Akelamo. Hasil analisis laboratorium menunjukkan kedutaan kandungan emas di daerah Oba Tengah dari sedimen sungai mencapai nilai tertinggi hingga

127gr/t dari soil mencapai 803 mgr/t Au sedangkan dari batu 328 gr/t Au. Untuk Kelurahan Akelamo telah dieksplorasi oleh PT. Gema Nusantara Bhakti dan PT. Shana Tova Anugrah.

- Kecamatan Oba Utara terdapat di Desa Kaiyasa namun belum ada hasil analisa laboratorium.
- Kecamatan Oba Selatan terdapat di Desa Nuku dengan nilai sampel tertinggi, Cu 0,36%. Au 0,094 g/t, Ag 5,29 g/t.

b). Nikel (NI)

Endapan bahan galian nikel terdapat di :

- Kecamatan Oba Desa Woda dari hasil analisis X-Ray menunjukkan kandungan Ni 1,38%, Fe 203 29,25%, MgO 16,00%, MnO₂ 0,68%, SiO₂ 32,84%. Untuk Kecamatan Oba, Nikel telah dieksplorasi oleh PT. Banua Sanggam Lestari, PT. Usaha Kita Kinerjatama. PT. Mulia Anugrah Sawitindo dan PT Cetara Bagun Persada.
- Kecamatan Oba Selatan Desa Hager dari hasil analisa laboratorium sampel permukaan hasil tertinggi, Fe 10,16%, Ni 0,005%. Untuk Kecamatan Oba Selatan, Nikel telah dieksplorasi oleh PT Usaha Kita Kinerjatama dan PT. Cetara Bangun Persada.

c). Pasir Besi

Lokasi endapan bahan galian pasir besi terdapat di Desa Kususinopa Kecamatan Oba. Dari hasil analisis Fe 59,35%, SiO₂ 2,02% dan TiO₂ 7,20%. Pasir Besi ini telah dieksplorasi oleh PT. Berkat Anugrah Maju Abadi.

d). Batubara

Terdapat di Desa Gita dan Woda Kecamatan Oba dengan hasil analisa laboratorium Cal/g 4.513 dan Cal/g 5.205.

e). Batu Andesit

Batu Andesit terdapat di sebagian wilayah Pulau Tidore yaitu Kelurahan Tuguha dan Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan, Kelurahan Tambula Kecamatan Tidore dan Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara.

F). Batu Apung (Pumice)

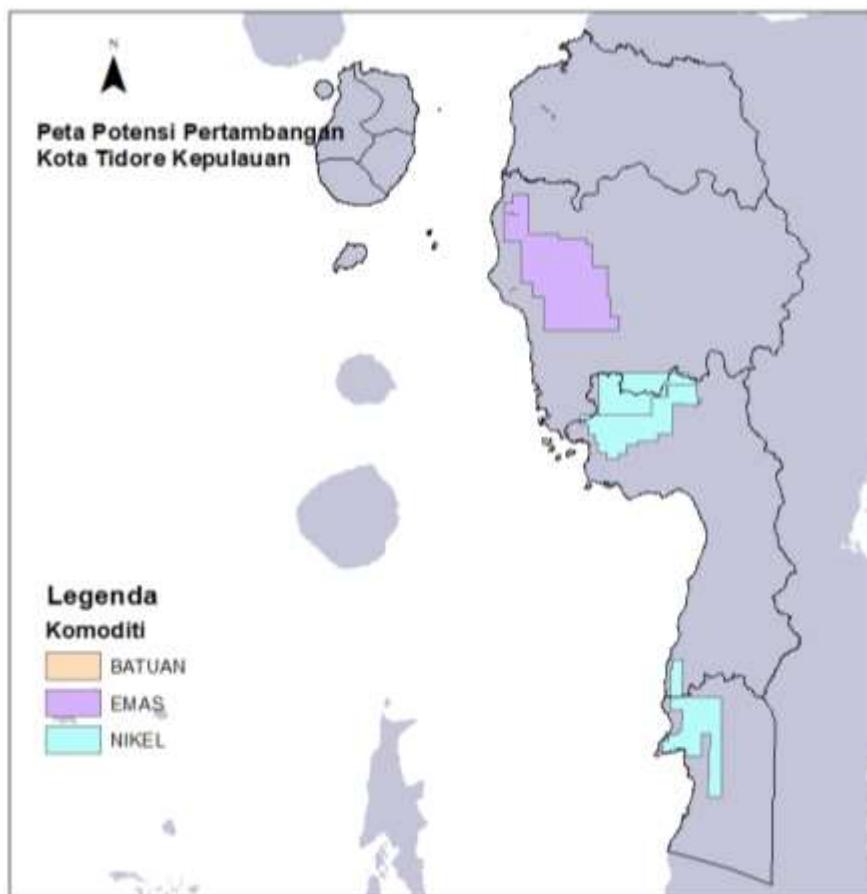
Batu apung terdapat di bagian wilayah Pulau Tidore yaitu Kelurahan Rum, Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara, Kelurahan Indonesiana dan Kelurahan Goto Kecamatan Tidore serta Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur.

g). Pasir Pantai

Bahan galian pasir pantai tersebar di sepanjang dataran Oba Pulau Halmahera yaitu : Desa Kusu Kecamatan Oba Utara, Desa Pasigau dan Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah.

h). Batu dan Sirtu

Batu dan sirtu terdapat di wilayah Kota Tidore Kepulauan di Kali Oba Kecamatan Oba Utara, Kali Tobatu dan Kali Akelamo Kecamatan Oba Tengah serta Kali Tayawi Kecamatan Oba.



Gambar 2.19
Peta Potensi Pertambangan di Kota Tidore Kepulauan

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

▪ **Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi**

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Tidore Kepulauan didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Tidore Kepulauan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Tidore Kepulauan pada tahun 2020 masih dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu mencapai 39,14 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa PDRB Kota Tidore Kepulauan sangat dipengaruhi oleh belanja Pemerintah lewat APBD (Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan).

Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,77 persen. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi 10,98 persen. Sementara itu, peranan kategori lainnya dibawah 10 persen.

Dalam 5 tahun terakhir, dari 3 kategori dominan tersebut, hanya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yang terus mengalami peningkatan peranan. Sementara itu, Pertanian, kehutanan, dan perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah tidak adanya peningkatan produksi secara signifikan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha ini.

Detail datanya sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.16, Tabel 2.17 dan Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.16 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tidore Kepulauan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	581.758,38	616.483,26	648.562,4	691.556,6	707.827,1
B	Pertambangan dan Penggalian	1.257,64	1.352,84	1.456,90	1.582,07	1.570,6
C	Industri Pengolahan	85.651,93	88.193,56	89.707,6	91.514,7	76.259,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.996,27	5.269,81	5.678,53	5.740,0	6.030,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.837,31	3.071,39	3.248,7	3.649,2	4.217,6
F	Konstruksi	150.168,81	161.423,59	180.404,7	199.451,6	191.080,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	245.373,99	285.350,59	317.823,8	346.792,2	326.877,8
H	Transportasi dan Pergudangan	87.879,51	96.652,77	107.368,0	116.751,7	106.344,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.927,91	4.623,51	5.210,2	5.613,7	5.273,0
J	Informasi dan Komunikasi	70.969,06	76.359,83	85.152,7	88.927,7	95.964,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	49.645,03	54.859,20	59.351,4	65.874,4	71.048,5
L	Real Estate	1.866,22	2.095,08	2.277,7	2.370,90	2.383,4
M, N	Jasa Perusahaan	8.432,79	9.032,83	9.294,81	10.117,6	9.946,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	815.208,88	872.731,59	966.167,91	1.069.352,2	1.165.476,8
P	Jasa Pendidikan	89.887,90	101.045,73	109.056,46	114.870,8	124.040,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45.712,79	49.815,98	56.216,83	60.824,03	68.708,2
R, S, T, U	Jasa lainnya	11.809,57	12.637,56	13.818,14	14.930,43	14.473,2
PDRB		2.256.383,99	2.440.999,12	2.660.796,7	2.899.920,8	2.977.522,3

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tidore Kepulauan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
----------	--------	------	------	------	------	------

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	413 994,15	428 795,34	439 514,33	460,307.3	462,699.9
B	Pertambangan dan Penggalian	954,78	998,32	1 054,25	1 120,91	1,072.8
C	Industri Pengolahan	68 833,70	69 710,52	69 783,34	70,644.1	59,494.6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3 532,79	4 068,08	4 322,06	4 358,04	4,543.5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 268,70	2 429,46	2 662,16	2,897.8	3,285.4
F	Konstruksi	116 256,26	123 329,29	133 202,76	141,255.6	134,897.9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	184 139,11	209 902,92	230 049,94	247,649.7	231,091.4
H	Transportasi dan Pergudangan	61 855,95	66 100,52	71 822,46	76,698.0	67,708.0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 843,31	3 226,42	3 581,48	3,839.8	3,594.0
J	Informasi dan Komunikasi	62 028,30	64 889,82	70 900,04	74,095.1	79,964.4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	37 109,74	39 186,70	40 603,32	43 983,38	47,678.5
L	Real Estate	1 466,09	1 611,19	1 689,48	1 741,25	1,746.8
M,N	Jasa Perusahaan	6 812,44	7 068,17	7 253,58	7 631,49	7,407.6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	67 202,60	71 365,54	694 654,25	750,205.3	812,809.9
P	Jasa Pendidikan	34 550,46	36 511,00	74 892,48	77 888,18	82,350.6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9 513,77	9 986,24	40 121,92	42 529,24	47,184.4
R,S,T,U	Jasa lainnya	1 687 144,57	1 788 392,78	10 694,52	11,333.7	10,889.2
	PDRB	67 202,60	71 365,54	1 896 802,38	2,018,223.7	2,058,419.0

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.18. Persentase PDRB Kota Tidore Kepulauan tahun 2016 - 2020 Berdasarkan atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
A	25,78	25,26	24,39	23,93	23,77
B	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
C	3,80	3,61	3,42	3,17	2,56
D	0,18	0,21	0,21	0,20	0,20
E	0,13	0,13	0,12	0,13	0,14
F	6,66	6,59	6,77	6,90	6,42
G	10,87	11,69	11,93	12,00	10,98
H	3,89	3,84	4,03	4,04	3,57
I	0,17	0,19	0,20	0,19	0,18
J	3,15	3,13	3,20	3,08	3,22
K	2,20	2,30	2,23	2,28	2,39
L	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08
M,N	0,37	0,37	0,35	0,35	0,33
O	36,13	36,00	36,28	37,00	39,14
P	3,94	4,14	4,10	3,97	4,17
Q	2,03	2,04	2,11	2,10	2,31
R,S,T,	0,52	0,51	0,52	0,52	0,49
	PDRB	100	100	100	100

Berdasarkan data dari Badan Statistik Kota Tidore Kepulauan, nilai PDRB Tidore Kepulauan atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 2,97 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan 87,6 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,89 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi dan kenaikan harga.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, yakni dari 2,02 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 2,06 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kota Tidore Kepulauan hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,99 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif, seperti Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 13,37 persen. Salah satu penyebabnya adalah peningkatan produksi air bersih oleh PDAM Kota Tidore Kepulauan. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan peningkatan pertumbuhan mencapai 10,95 persen. Hal tersebut dipicu dari adanya anggaran untuk Jasa Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020.

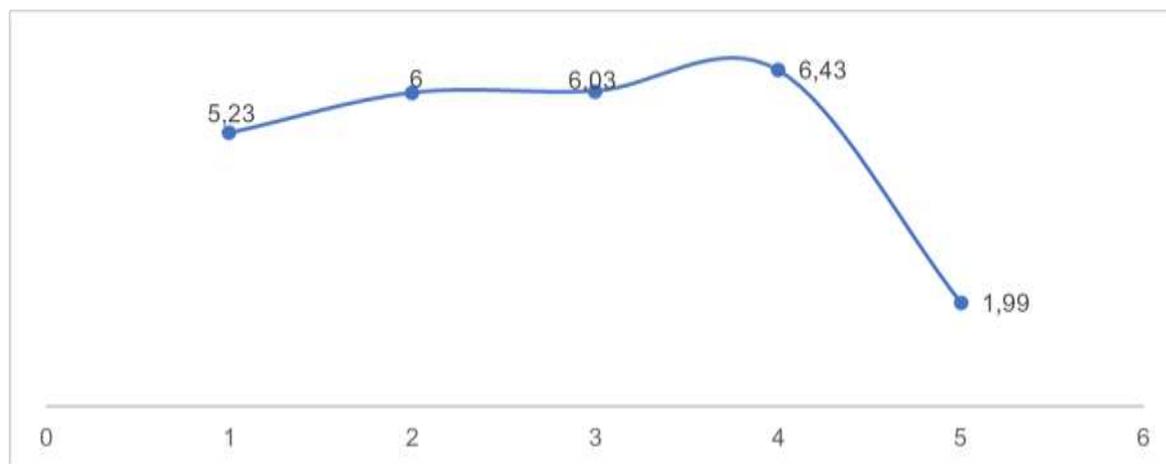
Dari 17 lapangan usaha ekonomi, 9 kategori mengalami pertumbuhan yang positif. Kategori lapangan usaha industri pengolahan adalah yang paling mengalami dampak yang dilihat dari angka pertumbuhan yang merosot hingga -15,78 persen. Pertumbuhan negatif juga terjadi pada lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi hingga -11,72 persen.

Tabel 2.19. Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,77	3,58	2,35	4,88	0,52
Pertambangan dan Penggalian	4,26	4,56	5,60	6,32	-4,30
Industri Pengolahan	4,42	1,27	0,30	1,04	-15,78
Pengadaan Listrik dan Gas	17,63	15,15	6,24	0,83	4,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	7,09	6,70	11,79	13,37
Konstruksi	7,19	6,08	8,01	6,05	-4,50
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,85	13,99	9,60	7,65	-6,69
Transportasi dan Pergudangan	7,66	6,86	8,66	6,78	-11,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,28	13,47	11,00	7,21	-6,40
Informasi dan Komunikasi	4,99	4,61	9,26	4,51	7,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,95	5,60	3,62	8,32	8,40
Real Estate	1,44	9,90	4,86	3,06	0,32
Jasa Perusahaan	3,04	3,75	2,62	5,83	-3,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,71	5,77	7,00	8,00	8,34
Jasa Pendidikan	3,80	6,19	4,94	4,00	5,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,92	5,67	9,89	6,00	10,95
Jasa Lainnya	5,80	4,97	7,09	5,98	-3,92
PDRB	5,23	6,00	6,03	6,43	1,99

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021

Secara grafik, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 – 2020 digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.20
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020

▪ **Sektor Basis**

Untuk mengetahui sektor basis dilakukan dengan menghitung LQ Kota Tidore Kepulauan berdasarkan PDRB Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah induk pada tahun yang sama.

Apabila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di Kota Tidore Kepulauan lebih menonjol daripada peranan sektor tersebut se Provinsi Maluku Utara. Sebaliknya, apabila $LQ < 1$ maka peranan sektor tersebut di Kota Tidore Kepulauan lebih kecil daripada peranan sektor tersebut se-Provinsi Maluku Utara. $LQ > 1$ menunjukkan bahwa peranan sektor i cukup menonjol di daerah tersebut dan seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor i dan mengekspornya ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. Atas dasar itu $LQ > 1$ secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i dimaksud.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 diketahui bahwa sektor basis di Kota Tidore Kepulauan ($LQ > 1$) adalah sektor-sektor sebagai berikut :

- (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- (2) Pengadaan Listrik dan Gas;
- (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- (4) Jasa Perusahaan;
- (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- (6) Jasa Pendidikan; dan
- (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel 2.20. Perhitungan LQ Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Atas Dasar Harga Konstan

No.	Sektor	Nilai PDRB Kota (Miliar rupiah)	Nilai PDRB Provinsi (Miliar rupiah)	LQ
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	462,70	5.593,19	1,12
2	Pertambangan dan Penggalian	1,07	2.880,45	0,01
3	Industri Pengolahan	59,49	3.184,51	0,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,54	28,78	2,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,29	24,26	1,83
6	Konstruksi	134,90	1.962,80	0,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	231,09	4.594,99	0,68
8	Transportasi dan Pergudangan	67,71	1.264,83	0,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,59	114,89	0,42
10	Informasi dan Komunikasi	79,96	1.264,05	0,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	47,68	847,50	0,76
12	Real Estate	1,75	30,80	0,77
13	Jasa Perusahaan	7,41	85,94	1,17

No.	Sektor	Nilai PDRB Kota (Miliar rupiah)	Nilai PDRB Provinsi (Miliar rupiah)	LQ
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	812,81	4.267,91	2,58
15	Jasa Pendidikan	82,35	881,89	1,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47,18	610,93	1,05
17	Jasa lainnya	10,89	230,74	0,64
Total PDRB		2.058,42	27.868,47	

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021 (Data diolah)

Tabel 2.21. Perhitungan LQ Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Atas Dasar Harga Berlaku

No.	Sektor	Nilai PDRB Kota (Miliar rupiah)	Nilai PDRB Provinsi (Miliar Rupiah)	LQ
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	707,83	8.905,19	1,12
2	Pertambangan dan Penggalian	1,57	4.682,54	0,00
3	Industri Pengolahan	76,26	4.824,68	0,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,03	38,36	2,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,22	30,88	1,93
6	Konstruksi	191,08	2.928,33	0,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	326,88	6.721,83	0,69
8	Transportasi dan Pergudangan	106,34	1.968,82	0,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,27	160,95	0,46
10	Informasi dan Komunikasi	95,96	1.449,51	0,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	71,05	1.272,22	0,79
12	Real Estate	2,38	42,95	0,79
13	Jasa Perusahaan	9,95	120,51	1,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.165,48	6.414,62	2,57
15	Jasa Pendidikan	124,04	1.377,03	1,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,71	895,63	1,09
17	Jasa lainnya	14,47	308,19	0,66
Total PDRB		2.977,52	42.142,24	

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021 (Data diolah)

▪ **PDRB Per Kapita**

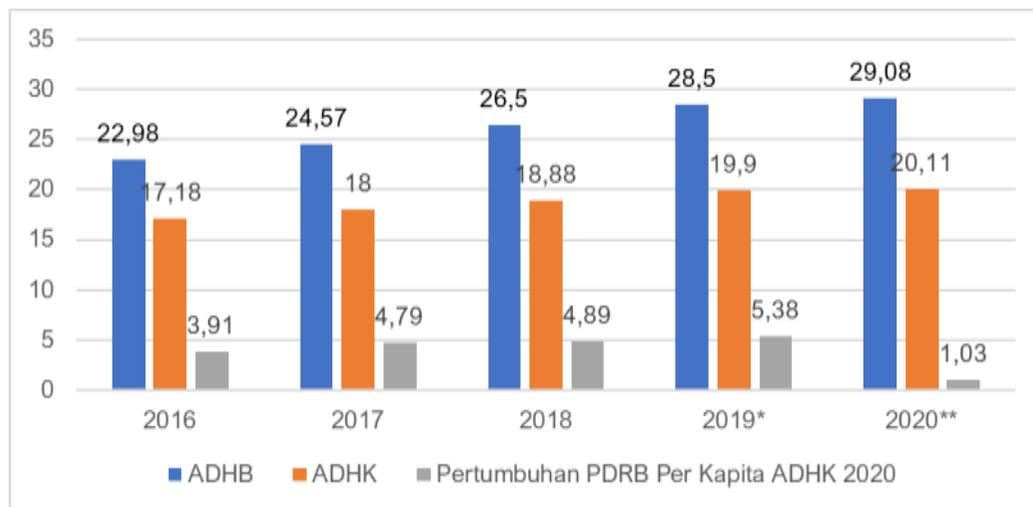
PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Tidore Kepulauan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 22,98 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 29,08 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh inflasi.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB per kapita juga terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan nilai ini berkisar 1 – 5 persen per tahun. Hal tersebut mengakibatkan nilai PDRB per kapita yang pada tahun 2019 sebesar 19,90 juta per kapita per tahun meningkat menjadi 20,11 juta rupiah per kapita per tahun pada 2020.

Peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan adanya perbaikan skala perekonomian dengan mempertimbangkan adanya penambahan beban penduduk pada suatu daerah. Sehingga, nilai pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan lazimnya akan lebih rendah dari pada nilai pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Contohnya nilai pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada 2020 sebesar 1,03 persen, lebih rendah dari nilai pertumbuhan PDRB atas dasar konstan yang mencapai 1,99 persen.

Banyak stakeholder yang menginterpretasikan PDRB per kapita sebagai indikator pendapatan masyarakat. Namun yang harus diperhatikan adalah PDRB per kapita belum memperhatikan adanya ketimpangan antar penduduk. Sehingga kita tidak dapat menggunakan PDRB per kapita sebagai indikator tunggal dalam melihat pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.21

Grafik PDRB Perkapita (Rp Juta) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020
(Keterangan Gambar : * Angka sementara; ** Angka sangat sementara)

▪ **Inflasi Daerah**

Selain data PDRB, data inflasi juga penting diketahui, sebab inflasi merupakan salah satu indikator penting untuk memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pengaruhnya terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Inflasi Kota Tidore Kepulauan menggunakan data inflasi Kota Ternate. Data inflasi tahun 2016-2020 nilainya cenderung terkendalisebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Inflasi Per Tahun
Maluku Utara (%)	1,91	1,97	4,12	2,02	2,13	2,43
Nasional (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021 (Data diolah)

▪ **Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini**

Gini ratio merupakan ukuran yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai gini ratio antara 0 dan 1. Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai gini makasemakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- GR < 0,4 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0,4 < GR < 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat)
- GR > 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Tabel 2.23. Gini Rasio Antara Kota Tidore Kepulauan dan Nasional 2016-2020

Gini Ratio	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	0.397	0.393	0.389	0.380	0,381
Tidore Kepulauan	0.23	0.23	0.30	0.26	0.31

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021 (Data diolah)

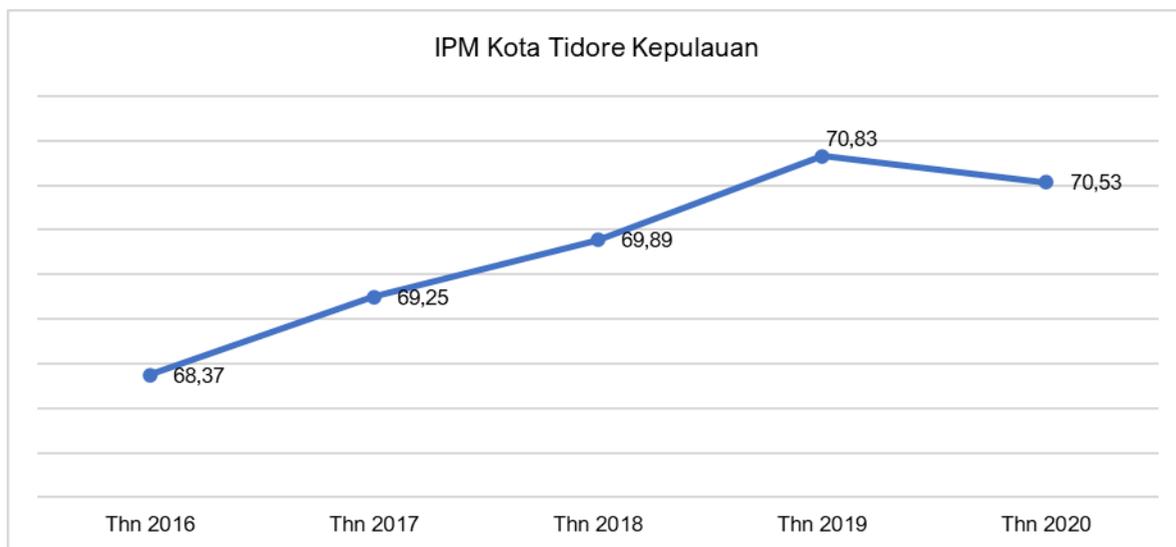
Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tidore Kepulauan masuk dalam kategori ketimpangan rendah, dimana gini rasio di bawah 0,4.

▪ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia. IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat capaian pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan (Angka Melek Huruf) dan Rata-rata Lama Sekolah, Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup).

IPM Kota Tidore Kepulauan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, naik dari 68,37 pada tahun 2016 menjadi 70,53 pada tahun 2020. Walau demikian, IPM tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus -0,42 hal ini disebabkan karena ada penurunan nilai pada

salah satu indikator pendukung yaitu pengeluaran perkapita, yakni dari Rp 8.608.000 pada tahun 2019 menjadi Rp 8.188.000 pada tahun 2020.



Gambar 2.22
Grafik Perkembangan IPM Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020

IPM Kota Tidore Kepulauan jika dibandingkan dengan IPM Kota Ternate dan IPM Nasional belum terlalu menggembirakan. IPM Kota Tidore Kepulauan masih dibawah IPM Kota Ternate dan IPM Nasional, walau disbanding dengan IPM Provinsi Maluku Utara, IPM Kota Tidore Kepulauan masih lebih tinggi.

Tabel 2.24. Perbandingan IPM Kota dengan Kota Ternate, Maluku Utara dan Indonesia

IPM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tidore Kepulauan	68,37	69,25	69,89	70,83	70,53
Kota Ternate	77,8	78,48	79,13	80,03	79,82
Maluku Utara	66,63	67,2	67,76	68,7	68,49
Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan , 2021

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Aspek kesejahteraan sosial meliputi Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Usia Harapan Hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 2.25. Kondisi Kesejahteraan Sosial Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,51	1,10	0,30

2	Angka melek huruf usia 15+	%	99,99	99,98	99,99
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,9	14,2	14,3
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,63	9,64	9,73
5	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,87	69,22	69,34
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,16	65,11	67,07
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,97	4,65	4,95
8	Persentase Penduduk Miskin	%	5,95	6,10	6,52

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan , 2021

▪ **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Peningkatan jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan jika dilihat cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun kenaikannya masih terkendali sesuai standar nasional yaitu pertumbuhan dibawah 2% pertahun, dimana laju pertumbuhan penduduk di tahun 2019 sebesar 1,10% dengan jumlah penduduknya sebanyak 114.748 jiwa sedangkan untuk tahun 2020 jumlah penduduk menjadi 115.089 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,30%.

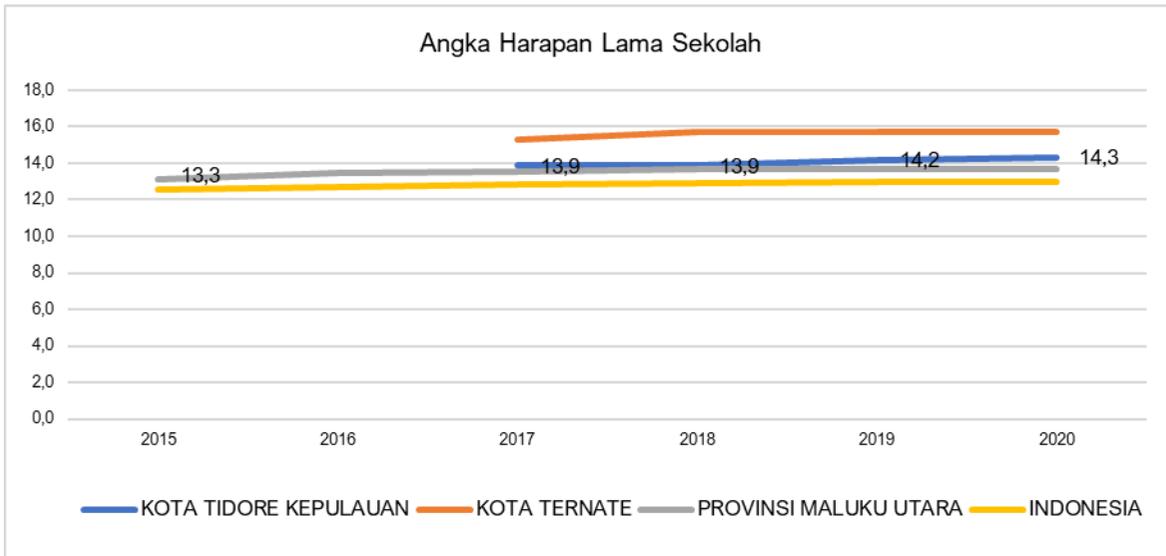
▪ **Angka Melek Huruf**

Belum seluruh penduduk Kota Tidore Kepulauan yang berusia di atas 15 tahun melek huruf. Data BPS Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa masih ada 0,01 persen (18 orang) yang masih buta huruf. Kelompok umur terbesar adalah penduduk yang berumur diatas 50 tahun.

▪ **Harapan Lama Sekolah**

Angka harapan lama sekolah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, yakni dari 13,9 tahun pada tahun 2018 menjadi 14,3 tahun pada tahun 2020. Angka ini masih dibawah angka rata-rata lama sekolah Kota Ternate, tetapi di atas angka rata-rata Provinsi Maluku Utara dan rata-rata Nasional.

Data memperlihatkan bahwa pendidikan rata-rata masyarakat adalah tamatan SLTA dan kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Hal ini dapat terbaca pada data komposisi penduduk Kota Tidore Kepulauan berdasarkan tingkat Pendidikan yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang sudah berijazah sarjana (S1) hanya 7,6 persen dari jumlah total penduduk pada tahun 2020.



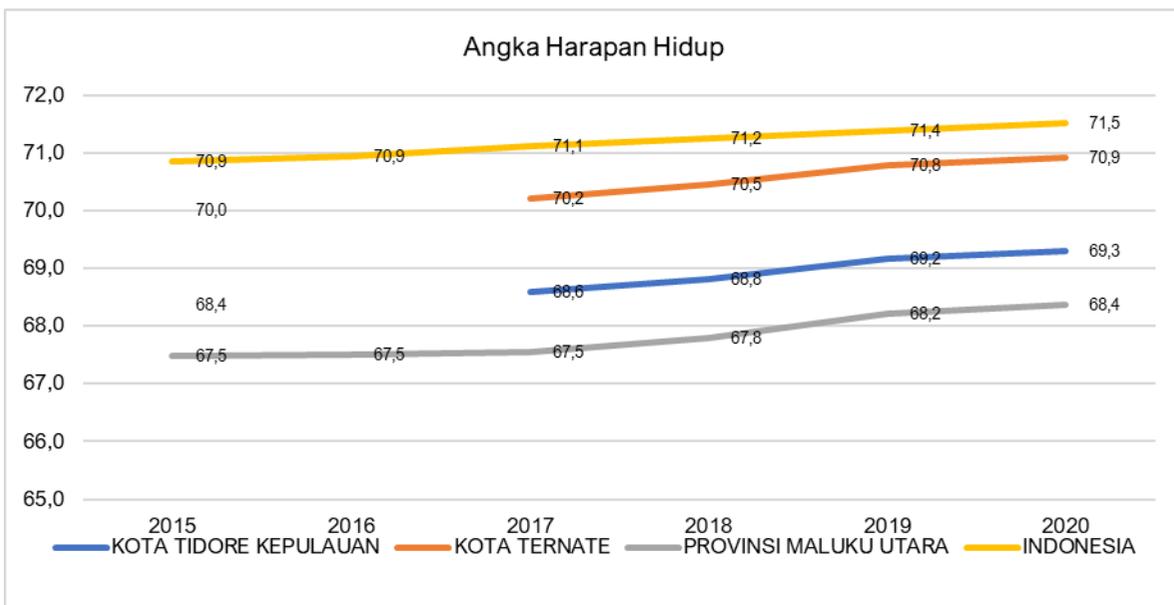
Gambar 2.23
Grafik Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah

- **Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah memperlihatkan peningkatan dari 9,63 tahun pada 2018 meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,73 tahun, namun kenaikan tersebut masih dibawah Kota Ternate secara regional.

- **Angka Usia Harapan Hidup**

Angka usia harapan hidup cenderung meningkat, dari 68,87 tahun pada 2018 menjadi 69,34 tahun pada 2020. Angka ini di atas rata-rata AHH Provinsi Maluku Utara, tapi masih dibawah AHH Kota Ternate dan AHH Indonesia.



Gambar 2.24
Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 65,16 persen menjadi 67,07 persen pada tahun 2020.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Data BPS Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa TPT di Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 2.156 menjadi 2.496 tahun 2020, namun angka peningkatannya tidak sampai angka satu digit.

- **Persentase Penduduk Miskin**

Persentase penduduk miskin di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan dari 5,95 persen pada tahun 2018 menjadi 6,52 persen pada tahun 2020.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Capaian pada urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

1) Pendidikan

Lembaga pendidikan di Kota Tidore Kepulauan terbilang cukup lengkap. Mulai dari PAUD/Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Tinggi, dan Universitas. Termasuk sekolah keagamaan, seperti Raudathul athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah maupun pesantren.

Tabel 2.26. Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah) di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020

No.	Kecamatan	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			Total
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
1	Kec. Tidore Selatan	11	1	12	4	3	7	2	1	3	1	0	1	23
2	Kec. Tidore Utara	17	3	20	5	2	7	3	2	5	0	0	0	32
3	Kec. Oba	13	1	14	6	2	8	2	2	4	1	0	1	27
4	Kec. Oba Utara	16	1	17	4	4	8	4	5	9	1	1	2	36
5	Kec. Oba Tengah	16	0	16	6	3	9	1	3	4	1	0	1	30
6	Kec. Oba Selatan	10	0	10	3	1	4	2	0	2	0	0	0	16
7	Kec. Tidore	14	2	16	2	3	5	2	3	5	1	0	1	27
8	Kec. Tidore Timur	8	1	9	2	0	2	1	1	2	1	0	1	14
	Total	105	9	114	32	18	50	17	17	34	6	1	7	205

Sumber : <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

Lembaga pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah PAUD, SD, dan SMP. Jumlah PAUD di Kota Tidore Kepulauan tahun 2020 adalah sebanyak 97, dimana yang berstatus negeri hanya 7 satuan pendidikan dan sebanyak 90 satuan pendidikan adalah berstatus swasta.

Terkait akreditasi sekolah, pada tahun 2020 jumlah sekolah setingkat SD di Kota Tidore Kepulauan yang terakreditasi sebanyak 100 SD dimana terbagi dalam akreditasi A sebanyak 31, akreditasi B sebanyak 64 dan akreditasi C sebanyak 5.

Adapun untuk tingkatan SMP yang terakreditasi sebanyak 37 sekolah dimana akreditasi A sebanyak 8, akreditasi B sebanyak 15 dan akreditasi C sebanyak 14.

Dalam upaya peningkatan mutu pengajar baik ditingkat TK, PAUD, SD sampai SMP setiap tahunnya diupayakan diadakan ujian sertifikasi bagi para guru, data sampai tahun 2020 terdapat sebanyak 625 guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sedangkan yang belum memiliki sertifikat pendidik sebanyak 763 guru.

Tabel 2.27. Jenjang Pendidikan Guru Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan Guru	Guru PNS		Guru Non PNS		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	SMA	76	5,6	59	9,9	135	6,9
2	D1	2	0,1	0	0,0	2	0,1
3	D2	127	9,3	89	14,9	216	11,0
4	D3	4	0,3	12	2,0	16	0,8
5	S1	1139	83,6	433	72,7	1572	80,3
6	S2	14	1,0	3	0,5	17	0,9
7	S3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Jumlah	1362	100	596	100	1958	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.28. Data Guru Kota Tidore Kepulauan yang Bersertifikasi Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Persentasi
1	Guru bersertifikasi	625	45.02
2	Guru yang belum bersertifikasi	763	54.97
	Jumlah	1388	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.29. Capaian kinerja bidang pendidikan Kota Tidore Kepulauan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)(%)	88,41	79,68	79,45	75,01
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	APK SD/MI/Paket A(%)	100,27	101,41	101,91	105,91
	APK SMP/MTs/Paket B(%)	90,15	92,49	92,25	85,24
3	Angka pendidikan yang ditamatkan:				
	Tamat SD	22,05	22,08	21,68	21,68
	Tamat SMP	13,66	13,32	12,97	13,05
4	Angka Partisipasi Murni (APM) :				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,42	92,35	89,18	84,28
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69,18	78,51	69,54	60,77
5	Angka Partisipasi Sekolah				
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MIN/Paket A	89,42	92,35	89,18	84,28
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	69,18	78,51	69,54	60,77
6	Angka Putus Sekolah :				
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,11	0,00	0,01	0,07
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,09	0,00	0,02	0,23
7	Angka Kelulusan :				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,9	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):				
	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	102,99	97,58	98,39	106,48
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	102,41	77,95	Data di Provinsi	Data di Provinsi
9	Fasilitas Pendidikan :				
	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik(%)	92,08	77,23	91,09	90,2
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	89,23	72,97	81,08	81,08
10	Rasio guru /murid sekolah pendidikan dasar	74,25	75,00	75,67	95,91
11	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	74,36	74,26	74,36	115,61
12	Rasio guru /murid per kelas rata-rata sekolah dasar	12,36	12,50	12,61	15,98
13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	24,69	24,75	24,78	38,53
14	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,98	99,99	99,99	99,99
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	84,08	84,04	86,05	53,05

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, 2021

2) Kesehatan

Infrastruktur pelayanan kesehatan tersebar merata di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan. Selain satu Rumah Sakit Daerah yang terdapat di Kecamatan Tidore, terdapat pula 10 Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, serta Puskesmas-puskesmas pembantu sebagaimana dipelihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.30. Data Status Puskesmas Tahun 2020

No	Nama Puskesmas	Jenis Puskesmas
1	Akelamo	Rawat Inap
2	Galala	Rawat Inap
3	Lifofa	Rawat Inap
4	Ome	Rawat Inap
5	Payahe	Rawat Inap
6	Rum Balibunga	Non Rawat Inap
7	Soasio	Non Rawat Inap
8	Tomalou	Non Rawat Inap
9	Tosa	Rawat Inap
10	Tului Talagamori	Non Rawat Ina

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan (2021)

Data dari Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2020), penyakit yang paling tinggi (rata-rata 35 persen) di derita oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA.

Tabel 2.31. Daftar Sepuluh Penyakit Terbanyak Tahun 2016 – 2020

NAMA PENYAKIT	THN 2016	NAMA PENYAKIT	THN 2017	NAMA PENYAKIT	THN 2018	NAMA PENYAKIT	THN 2019	NAMA PENYAKIT	THN 2020
ISPA	15453	ISPA	14952	ISPA	14114	ISPA	14007	ISPA	4152
OBS. FEBRIS	4529	HIPERTENSI	4320	HIPERTENSI	5581	HIPERTENSI	6385	FARINGITIS AKUT	1380
DISPEPSIA	4203	DISPEPSIA	4119	DISPEPSIA	3796	DISPEPSIA	4478	DERMATITIS KONTAK ALERGI	1200
MYALGIA	3891	MYALGIA	4076	MYALGIA	3359	MYALGIA	3887	GASTRITIS	1151
HIPERTENSI	3290	OBS.FEBRIS	3553	OBS.FEBRIS	3150	OBSERVASI FEBRIS	3528	MYALGIA	1024
PHARINGITIS	2996	PHARINGITIS	2754	PHARINGITIS	3066	PHARINGITIS	2268	HIPERTENSI ESENSIAL	1337
COMMON COLD	2595	COMMON COLD	2541	COMMON COLD	2843	COMMON COLD	1887	OBSERVASI FEBRIS	764
PENYAKIT KULIT ALERGI	1372	DIARE	1206	PENYAKIT KULIT ALERGI	1517	DM	1683	INFLUENZA	760
PENYAKIT KULIT INFEKSI	1159	DISLIPIDEMIA/ GANGGUAN LEMAK	1554	DM	1122	PENYAKIT KULIT ALERGI	1296	DISPEPSIA	743
DISLIPIDEMIA	1022	DKA	1215	RHEMATOID ATRITIS	1086	HIPERKOLESTEROL	1047	POLIMIALGIA REUMATIK	338

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan (2021)

Dari data 10 penyakit teratas yang diderita tersebut, terdapat lima penyakit yang selalu masuk dalam daftar 10 penyakit teratas, yakni : ISPA, demam atau Observasi Febris, maag atau Dispepsia, nyeri pada otot atau Myalgia, tekanan darah tinggi atau Hipertensi dan radang tenggorokan atau Pharingitis.

Data stunting dan wasting dari tahun 2019-2020 di Kota Tidore Kepulauan tingkat prevelensinya sangat terkontrol dimana untuk data stunting ditahun 2019 dari target yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan 28% realisasi 10,2%, pada tahun 2020 targetnya 24,1 realisasi 7,6%. Untuk data wasting ditahun 2019 targetnya 9,5% realisasinya 4,4% dan pada tahun 2020 targetnya 8,1% realisasinya 3,4%. Untuk kasus stunting yang terjadi ditahun 2019 dan 2020 kasus terbanyak di Kecamatan Oba sebanyak 236 kasus dan 224 kasus. Sementara untuk kasus wasting ditahun 2019 kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Oba sebanyak 65 kasus, sedangkan untuk tahun 2020 kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Tidore sejumlah 76 kasus. Untuk lebih jelas terkait kasus stunting dan wasting dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.32. Data Stunting Dan Wasting 2019 Dan 2020

No	Kecamatan	Tahun 2019							
		Jml balita	di ukur	stunting	prevalensi (%)	jml balita	di timbang	wasting	prevalensi (%)
1	Tidore	1410	673	41	6.1	1410	673	19	2.8
2	Tidore Timur	621	621	73	11.8	621	620	40	6.5
3	Tidore Selatan	1060	1053	67	6.4	1060	1053	19	1.8
4	Tidore Utara	1312	1122	88	7.8	1312	1122	46	4.1
5	Oba Utara	1581	531	6	1.1	1581	532	7	1.3
6	Oba Tengah	733	566	50	8.8	733	574	17	3.0
7	Oba	1032	942	236	25.1	1032	942	65	6.9
8	Oba Selatan	467	461	47	10.2	467	467	48	10.3
	Total	8216	5969	608	10.2	8216	5983	261	4.4
No	Kecamatan	Tahun 2020							
		Jml balita	di ukur	stunting	prevalensi (%)	jml balita	di timbang	wasting	prevalensi (%)
1	Tidore	1380	1066	83	7.8	1380	1071	76	7.1
2	Tidore Timur	596	587	58	9.9	596	587	26	4.4
3	Tidore Selatan	1025	939	37	3.9	1025	939	6	0.6
4	Tidore Utara	1260	1218	101	8.3	1260	1219	64	5.3
5	Oba Utara	1674	1673	16	1.0	1674	1673	4	0.2
6	Oba Tengah	770	742	44	5.9	770	742	10	1.3
7	Oba	1041	981	224	22.8	1041	981	51	5.2
8	Oba Selatan	414	403	18	4.5	414	404	21	5.2
	TOTAL	8160	7609	581	7.6	8160	7616	258	3.4

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Jalan

Status jalan di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Total panjang jalan adalah 597,6 km. Sementara berdasarkan fungsi jalan, terbagi atas Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lokal Primer, Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan.

Capaian kinerja jalan status kota dalam dengan indikator persentase Panjang jalan dalam kondisi baik (atau dapat dilalui dengan kecepatan >40 km per jam) cenderung mengalami peningkatan, yakni dari 61,85 persen pada tahun 2017 menjadi 70,31 persen pada tahun 2020.

Untuk panjang jalan berdasarkan kondisi kelayakan terbagi dalam panjang jalan dalam kondisi baik 255.550 m, panjang jalan dalam kondisi sedang 9.300 m, panjang jalan dalam kondisi rusak 10.550 m, sedangkan untuk panjang jalan dalam kondisi rusak berat 88.035 m.

Data panjang jalan berdasarkan status dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33. Proporsi Jumlah KK yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2020

No.	Status Jalan	Fungsi	Panjang (m)
1	Nasional	Jalan Kolektor Primer	137786
		Jalan Kolektor Sekunder	4809
		Sub Total	142595
2	Provinsi	Jalan Kolektor Primer	55176
		Jalan Kolektor Sekunder	14922
		Jalan Lingkungan Primer	2823
		Sub Total	72921
3	Kota	Jalan Kolektor Primer	108714
		Jalan Kolektor Sekunder	37573
		Jalan Lokal Primer	134929
		Jalan Lokal Sekunder	70290
		Jalan Lingkungan	372130
		Sub Total	108714
		Total	587646

Sumber: Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan, 2021

Irigasi

Jaringan irigasi di Kota Tidore Kepulauan berada di Kecamatan Oba untuk mendukung kawasan pertanian. Jaringan irigasi ini terbagi atas jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dengan kondisi baik.

Tabel 2.34. Data Jaringan Irigasi Kecamatan Oba

No	Jenis Irigasi	Panjang (m)
1	Jaringan Irigasi Primer	13.089
2	Jaringan Irigasi Sekunder	11.649
	Jumlah	24.738

Sumber: Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan, 2020



Gambar 2.25. Peta Jaringan Irigasi di Kecamatan Oba

Air Bersih

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menikmati akses air bersih di Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka terakhir di tahun 2020, sudah 97,84 persen KK yang sudah menikmati akses air minum.

Tabel 2.35. Proporsi Jumlah KK yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih	15.696	16.952	17.537	24.958
2	Jumlah KK	20.003	20.003	20.003	25.509
3	Persentase KK berakses air bersih	78,47%	84,75%	87,67%	97,84%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.36. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih/Minum dan Jumlah KK Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Rumah Tinggal yang mendapatkan akses airbersih/minum	Persentase
1	Tidore Selatan	3556	3556	100
2	Tidore Utara	4179	3870	92,61
3	Tidore	4951	4951	100
4	Tidore Timur	2147	1905	88,73
5	Oba	3018	3018	100
6	Oba Selatan	1504	1504	100

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Rumah Tinggal yang mendapatkan akses airbersih/minum	Persentase
7	Oba Utara	3966	3966	100
8	Oba Tengah	2188	2188	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, 2021

Sanitasi

Program sanitasi lingkungan rumah tangga menunjukkan persentase pencapaiannya yang mencapai 81,50 % ditahun 2020 ini berarti bahwa kepedulian Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menangani persoalan sanitasi memberikan dampak yang signifikan. Adapun persyaratan sanitasi yang baik adalah minimal memiliki standar jamban yang sehat dan sistem air limbahnya yang tertutup serta tidak tergenang. Namun demikian secara pemerataan masih ada empat kecamatan diwilayah Oba yang persentasenya dibawah 90 persen seperti terlihat di tabel dibawah ini.

Tabel 2.37. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tinggal Berakses sanitasi	17.663	18.192	18.392	17.394
	Persentase	88,30%	90,95%	91,95%	81,50%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.38. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi	Persentase
1	Tidore Selatan	2956	2879	97,73
2	Tidore Utara	3362	2919	86,82
3	Tidore	4208	4140	98,38
4	Tidore Timur	1892	1615	85,36
5	Oba	2510	2150	85,66
6	Oba Selatan	1288	240	18,63
7	Oba Utara	3354	3221	96,03
8	Oba Tengah	1820	179	9,84

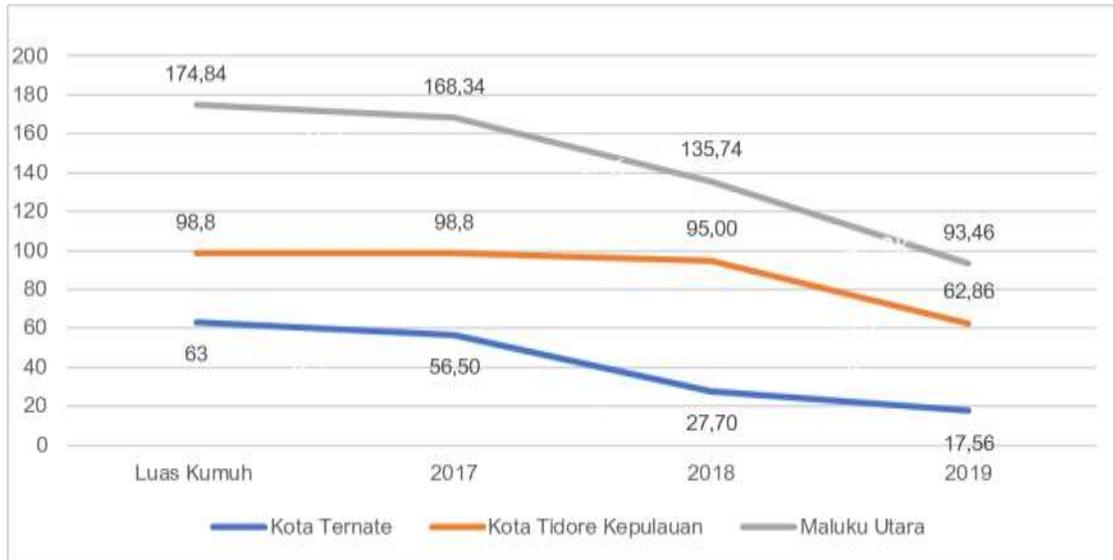
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, 2021

4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Perumahan dan Permukiman Kumuh

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh telah dilakukan sejak tahun 2017, yakni seluas 98,8 hektar. Penanganannya lewat program dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni yang dikenal dengan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta berkolaborasi dengan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTHLH) dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kota Tidore Kepulauan. Hasilnya adalah terjadi pengurangan menjadi 62,86 hektar pada tahun 2019.



Gambar 2.26

Grafik Perkembangan Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 – 2019

Pada tahun 2020, telah dilakukan identifikasi luasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh yakni seluas 183,78 Ha yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 103.1 Tahun 2020 dengan kategori rata-rata adalah kumuh ringan.

Dikatakan kumuh ringan karena berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria yang meliputi: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, memiliki skoring antara 16 – 37 yang berarti masuk dalam kategori kumuh ringan. Kriteria maupun pengkategorian dilakukan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Tabel 2.39. Luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Keterangan
1	Tidore Utara	Bobo	8,76	Kumuh Ringan
		Rum Balibunga	2	Kumuh Ringan
2	Tidore Selatan	Mare Kofo	4,8	Kumuh Ringan
3	Oba Utara	Galala	18,6	Kumuh Ringan
		Bukit Durian	20,3	Kumuh Ringan
		Ampera	12,2	Kumuh Ringan
		Garojou	10,9	Kumuh Ringan
		Guraping	15,7	Kumuh Ringan

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Keterangan
		Kaiyasa	9,8	Kumuh Ringan
4	Oba Tengah	Akelamo	12,5	Kumuh Ringan
		Lola	3	Kumuh Ringan
5	Oba	Woda	5,7	Kumuh Ringan
		Koli	5,4	Kumuh Ringan
		Kususinopa	8	Kumuh Ringan
		Payahé	4,7	Kumuh Ringan
		Toseho	3,78	Kumuh Ringan
		Kosa	5,64	Kumuh Ringan
6	Oba Selatan	Lifofa	8	Kumuh Ringan
		Maidi	4	Kumuh Ringan
		Selamalofa	8	Kumuh Ringan
		Hager	1,5	Kumuh Ringan
		Wama	4	Kumuh Ringan
		Tagalaya	1,5	Kumuh Ringan
		Nuku	5	Kumuh Ringan
Jumlah Total			183,78	

Sumber: Pokja PKP, 2020

5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Upaya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan melalui penegakan Perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan hal-hal lainnya.

- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio Polisi Pamong Praja Tahun 2020 per 10.000 penduduk sebesar 22,59, angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Dan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.40. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah polisi pamong praja	52	52	180	260	260
2	Jumlah penduduk	111.097	111.431	113.485	114.748	115.089
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4,68	4,67	15,86	22,65	22,59

Sumber: Kantor Satpol PP& Kebakaran Kota Tidore Kepulauan, 2021

- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2020 sebesar 16,85 berarti terdapat 16 anggota per 10.000 penduduk ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk namun anggota linmasnya jumlahnya tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.41. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Linmas	194	194	194	194	194
2	Jumlah penduduk	111.097	111.775	113.485	114.748	115.089
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	17,46	17,41	17,09	16,91	16,85

Sumber: Kantor Satpol PP& Kebakaran Kota Tidore Kepulauan

- Penegakan Perda

Persentase penegakan perda yang dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2020 mencapai 80%.

- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Tahun 2020 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 100% dimana dari pelanggaran K3 adalah berdasarkan laporan masuk dari masyarakat sebanyak 6 laporan pengaduan dan semuanya dapat diselesaikan secara keseluruhan.

- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Kota

Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai Kepmenneq P.U. No. 11/KPTS/2000 ditetapkan tidak boleh melebihi dari radius 7,5 Km² di luar daerah itu merupakan daerah tidak terlindungi (*unprotected area*), maka dengan asumsi bahwa cakupan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 Km, maka dapat ditetapkan bahwa WMK sebesar 176,26 Km².

Untuk rencana ke depan agar capaiannya meningkat atau setidaknya mendekati nilai nasional, maka perlu dikembangkan 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di daratan Oba.

- Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Capaian indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) di tahun 2020 adalah 92,5%, yang berada di Wilayah manajemen Kebakaran (WMK Tidore Pulau) sejumlah 4 kejadian.

Secara ringkas capaian kinerja bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari aspek pelayanan umum tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100
2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	80	85	85	85	92,5
3	Persentase Penegakan PERDA (%)	70	70	75	75	80

Sumber: Kantor Satpol PP& Kebakaran Kota Tidore Kepulauan, 2021

6) Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lanjut usia terlantar.

Secara ringkas capaian kinerja bidang sosial dari aspek pelayanan umum tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Sosial Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	80	80	90	98
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	80	80	85	98
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	70	70	80	90
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	0,0	0,0	-
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	0,11	0,05	0,11	0,12

Sumber: Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja;

- Tingkat partisipasi angkatan kerja

TPAK merupakan indikator untuk melihat besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.44. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Tdk Bekerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	APAK
1	Tidore	2.450	7.780	10.230	6.475	16.705	61
2	Oba Utara	1.653	5.710	7.363	6.018	13.381	55
3	Oba	1.717	4.316	6.033	3.812	9.845	61
4	Tidore Selatan	1.402	4.932	6.334	4.410	10.744	59
5	Tidore Utara	2.152	5.969	8.121	4.624	12.745	64
6	Oba Tengah	1.034	3.104	4.138	2.941	7.079	59
7	Oba Selatan	1.035	1.951	2.986	1.834	4.820	62
8	Tidore Timur	1.071	3.123	4.194	2.777	6.971	60
	Total	12.514	36.885	49.399	32.891	82.290	60

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2021

Dari hasil perhitungan diperoleh APAK Kota Tidore Kepulauan sebesar 60%, artinya 60% penduduk usia 15 – 64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif.

- Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio/DR*)

Angka Beban Ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif atas kelompok usia tidak produktif.

Tabel 2.45. Angka Beban Ketergantungan Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Usia 0 - 14	Usia 15 - 64	Usia >=65	DR
1	Tidore	5.016	16.705	1.225	37
2	Oba Utara	4.752	13.381	814	42
3	Oba	3.279	9.845	696	40
4	Tidore Selatan	3.404	10.744	1.015	41
5	Tidore Utara	3.839	12.745	1.112	39
6	Oba Tengah	2.480	7.079	503	42
7	Oba Selatan	1.647	4.820	322	41
8	Tidore Timur	2.236	6.971	459	39
Total		26.653	82.290	6.146	40

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Dari hasil perhitungan Angka Beban Ketergantungan untuk Kota Tidore Kepulauan pada Tahun 2020 adalah 40 artinya setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 40 jiwa penduduk yang belum produktif (dibawah 15 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (diatas 65 tahun).

- Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang mendaftar dalam kurun waktu 2016-2020 berkisar antara 316 sampai 976 orang. Terbanyak di tahun 2019. Dari jumlah tersebut, persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah di tahun 2016,2017dan 2020 yakni sebesar 100 persen sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.35. berikut.

Tabel 2.46. Pencari kerja yang di Tempatkan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	316	474	587	1.267	976
2	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendaftar	316	474	810	1.52	976
Persentase		100	100	72,46	83,35	100

Sumber: Disnakertrans Kota Tidore Kepulauan, 2021

2) Pangan;

Ketersediaan pangan utama di Kota Tidore Kepulauan masih tergantung dari daerah di luar wilayah Kota Tidore Kepulauan (96,6%), hanya 3,4% berasal dari produksi sendiri. Komoditi yang tergolong pangan utama antara lain yaitu: beras/sagu, daging, telur, jagung, kedelai, cabe, bawang, minyak kelapa dan gula pasir.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau

pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau kawasan Pangan Lestari), Intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA) guna terpenuhinya cadangan pangan di Kota Tidore Kepulauan.

3) *Pertanahan*;

Luas aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sampai dengan tahun 2020 adalah 4.681.747 meter persegi (sumber : Bidang Aset BPKAD, 2021).

4) *Lingkungan hidup*;

Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, belum seluruh sampah yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan dapat tertangani atau di kelola, utamanya pada kawasan-kawasan permukiman di jazirah Oba.

Tabel 2.47. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah timbulan sampah yang ditangani (Ton)	9.147,6	11.075,11	12.018,64	12.806,51	12.542
2	Jumlah volume produksi sampah (Ton)	16.075	16.220	16.269	16.476	16.753
	Persentase (%)	56,90	68,08	73,87	77,73	70,07

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan, 2021

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan kendala untuk mengoptimalkan penanganan sampah di Kota Tidore Kepulauan, seperti TPS/TPST/TPS3R. Dimana rasionya disbanding dengan jumlah penduduk terbilang sangat kecil sebagaimana diperlihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.48. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Daya Tampung TPS	78 m ³	120 m ³	150 m ³	150 m ³	180m ³
2	Jumlah Penduduk	111,097	111,431	111.785	113.485	115.089
3	Rasio Daya Tampung TPS Terhadap Jumlah penduduk	0,00070	0,00108	0,00132	0,00130	0,00157

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan, 2021

5) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu sasaran pembangunan, karena jumlah penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Berbagai inovasi telah dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja di bidang ini, seperti *jemput bola*. Dan terbukti capaiannya menggembarakan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.49. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Wajib Akte Lahir 0-18 thn		Akte nikah	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Tidore Selatan	10.598	539	2.462	2.156	3.951	639	2.092	4.684
2	Tidore Utara	12.621	425	2.607	2.651	4.538	826	2.283	5.535
3	Tidore	16.610	295	3.802	3.400	5.544	1.328	2.906	7.127
4	Tidore Timur	6.846	133	1.625	1.167	2.682	392	1.149	3.175
5	Oba	8.499	1.257	1.797	2.336	3.569	1.055	1.583	4.641
6	Oba Selatan	4.535	195	879	1.167	1.797	566	672	2.215
7	Oba Utara	12.905	356	3.125	2.566	5.238	1.055	1.583	4.641
8	Oba Tengah	6.967	58	1.407	1.512	2.927	514	1.108	3.369
Jumlah se-Kota Tidore		79.581	3.258	17.704	16.844	30.246	6.459	14.696	36.576

Sumber : Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan, 2021

Untuk pencapaian kinerja administrasi penduduk dan catatan sipil tahun 2016 – 2020 seperti yang tertuang dalam target tahunan maka kinerja administrasi kependudukan dianggap memenuhi target diantara lain disebabkan oleh upaya jemput bola dan program inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil Tahun 2016 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	54,19	67,28	65,41	63,38	69,15
2	Rasio bayi berakte kelahiran	81,18	83,33	92,86	91,55	92,07
3	Rasio pasangan berakte nikah	24,14	24,67	24,90	24,90	28,66
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	76,84	89,46	89,34	89,41	96,07
5	Cakupan penerbitan akte kelahiran	58,56	72,05	77,09	80,05	82,4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, 2021

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan diarahkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan dengan penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai dasar sosial kemasyarakatan, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan jumlah kelompok binaan PKK disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.51. Kelompok Binaan LPM Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidore Selatan	8	8	8	8	8
2	Tidore Utara	14	14	14	14	14
3	Tidore	13	13	13	13	13
4	Tidore Timur	7	7	7	7	7
5	Oba	13	13	13	13	13
6	Oba Selatan	7	7	7	7	7
7	Oba Utara	13	13	13	13	13
8	Oba Tengah	14	14	14	14	14
Jumlah		85	85	89	89	89

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.52. Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidore Selatan	9	9	9	9	9
2	Tidore Utara	15	15	15	15	15
3	Tidore	14	14	14	14	14
4	Tidore Timur	8	8	8	8	8
5	Oba	14	14	14	14	14
6	Oba Selatan	8	8	8	8	7
7	Oba Utara	14	14	14	14	14
8	Oba Tengah	15	15	15	15	15
9	PKK Kota	2	2	2	2	8
Jumlah		99	99	99	99	104

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan, 2021

Dari 89 jumlah LPM di Kota Tidore Kepulauan tahun 2020 semuanya masih aktif namun belum memiliki LPM berprestasi. Demikian juga PKK, dari 104 kelompok PKK, semuanya aktif. Namun untuk Posyandu, pada tahun 2020 dari 152 posyandu, terdapat 1 Posyandu yang tidak aktif.

Tabel 2.53. Cakupan Posyandu Aktif Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu Aktif	148	149	149	150	151
2	Jumlah Posyandu	148	149	149	150	152
	Persentase	100%	100%	100%	100%	99,3%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.54. Capaian Kinerja Bidang UrusanPemberdayaan Masyarakat DesaTahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	85	85	89	89	89
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	99	99	99	99	104
3	Persentase LPM Berprestasi (%)	0	1,12	2,24	0	3.56
4	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kota Tidore Kepulauan, 2021

7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Aspek Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terukur melalui beberapa indikator diantaranya cakupan peserta KB aktif, dan rasio akseptor KB. Sementara untuk pengentasan masalah kemiskinan terkait jumlah Keluarga Sejahtera I dan II.

Tabel 2.55. Keluarga Berencana Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	70.112	70.671	100,415	101,414	114,748
		29.916	29.807	27,958	29,253	34,548
		2,4	2,4	3,5	4,4	3
2	Rasio akseptor KB	21.918	10.756	10,081	11,731	11,184
		18.401	12.715	12,368	12,370	12,590
		120	85	82	95	89
3	Cakupan Peserta KB aktif	16.899	9.097	7,267	9,332	9,335
		18.401	12.715	12,368	12,370	12,590
		92	72	59	75,4	74

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB ,PP & PA Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.56. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

No	Tahun	Pra Sejahtera	KeluargaSejahtera		Jumlah KK	Sisa KK (Kel.Sejahtera)
			I	II		
1	2015	2.091	10.610	11.730	24.431	
2	2016	2.050	16.397	11.469	29.916	
3	2017	2.162	17.175	10.170	29.807	
4	2018	1.779	17.953	12.236	31.973	
5	2019	2.634	4.204	6.671	22.949	
6	2020	2,209	10,286	8,110	20,605	13,948

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB ,PP & PA Kota Tidore Kepulauan, 2021 (data diolah)

8) Perhubungan

Kondisi perhubungan yang ada di Kota Tidore Kepulauan masih menunjukkan perkembangan yang melambatdalam mendukung mobilisasi orang dan barang, ini dapat ditunjukkan dengan jumlah arus penumpang angkutan umum (orang) yang jumlahnya menurun ditahun 2020 sebanyak 834.000 orang jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 840.000 orang. Faktor perlambatan arus penumpang ini disebabkan antara lain beralihnya orang ke moda transportasi roda dua yang dianggap lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan kepemilikannya. Selain itu jam pengoperasian angkutan umum yang masih terbatas sampai dengan jam enam sore. Sementara itu pelabuhan Laut merupakan sarana penting untuk pelayanan transportasi laut untuk wilayah kepulauan seperti Kota Tidore Kepulauan, sehingga pengembangannya pun perlu menjadi perhatian.

Capaian kinerja bidang perhubungan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.57. Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	CapaianKinerja (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	643,000	764,000	774,000	840,000	834,000
2	Rasio ijin trayek (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah uji kir angkutan umum	421	430	470	485	230
4	Persentase layanan angkutan darat	0,48	0,51	0,53	0,56	0,78
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0,04	0,056	0,060	0,040	0,40
6	Persentase layanan angkutan darat	0,48	0,51	0,53	0,56	0,78
7	Jumlah pelabuhan laut	13	13	13	13	13
8	Jumlah terminal	3	3	3	3	3

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pelabuhan laut yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan adalah sebanyak 13 pelabuhan yang terus dilakukan pengembangannya, terdiri dari :

- 1) Pelabuhan Rum
- 2) Pelabuhan Maitara

- 3) Pelabuhan Mare
- 4) Pelabuhan Sarimalaha
- 5) Pelabuhan Itokici
- 6) Pelabuhan Sofifi
- 7) Pelabuhan Loleo
- 8) Pelabuhan Somahode
- 9) Pelabuhan Maldi
- 10) Pelabuhan Fery Dowora
- 11) Pelabuhan Fery Galala
- 12) Pelabuhan Fery Rum (dibawah ASDP/Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub)
- 13) Pelabuhan Trikora (dibawah Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub)

Sedangkan jumlah terminal yang ada di Kota Tidore Kepulauan adalah 3 terminal, terdiri dari :

- 1) Terminal Laut Rum
- 2) Terminal Soasio
- 3) Terminal Laut Sofifi

9) **Komunikasi dan informatika**

Dalam menindaklanjuti Inpres nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang berbasis elektronik (*e-government*) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus membangun dan memperluas infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet dilingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pembangunan jaringan komputer ini memungkinkan terkoneksiya semua OPD dalam jaringan internet sehingga memungkinkan tranformasi data/informasi antara masing-masing OPD dapat berjalan semakin lancar. Meski demikian masih terdapatnya beberapa areal yang belum dapat diakses jaringan telekomunikasi terutama di wilayah Oba Selatan. Dari data yang diperoleh Di Kota Tidore Kepulauan terdapat 48 Tower/ BTS yang dikelola oleh Telkomsel, XL dan Indosat dimana 44 Tower aktif jaringannya 4G serta 4 Tower dalam kondisi tidak aktif.

Jaringan komunikasi terdiri atas warnet, warung seluler, TV Kabel, BTS, Radio Antar Penduduk, Jasa Titipan, Telpn Umum/Fax.

Tabel 2.58. Cakupan Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Indikator	Jumlah
1	Warnet/Warung Seluler	34
2	TV Kabel	2
3	BTS	48
4	Radio Antar Penduduk	-
5	Jasa Titipan	4
6	Telepon Umum/ Fax	-
7	Wi-fi gratis	22

Sumber : Diskominfo Kota Tidore Kepulauan, 2021

10) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- Persentase Koperasi Aktif

Sesuai dengan aplikasi online data system (ODS) Kementerian Koperasi Dan UKM RI, jumlah Koperasi yang tersebar di wilayah Kota Tidore Kepulauan sebanyak 164 unit, yang terdiri dari 154 unit Primer Kabupaten/Kota, 1 unit Primer Nasional Dan 9 UNIT Primer Provinsi.

Dari 154 unit Koperasi sebanyak 32 unit dibubarkan oleh Kementerian Koperasi sebanyak Dan UKM RI sesuai dengan Keputusan Pembubaran Nomor : 114/KEP/M.KUKM.2/VII/2017 sehingga jumlah Koperasi pada saat ini sebanyak 124 unit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	86	84	85	85	85
2	Jumlah koperasi	116	122	124	124	124
3	Persentase koperasi aktif	74,14%	68,85%	68,55%	68,55%	68,55%

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan, 2021

- Usaha Mikro dan Kecil

Terkait data Usaha data Usaha Menengah, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan urusan Pemerintahan konkuren (urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Dimana urusan pemerintahan bidang UMKM yang menjadi kewenangan kabupaten/kota hanya terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, sementara urusan pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menjadi kewenangan provinsi dan usaha menengah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Demikian halnya dengan pembinaan dan pengawasan BPR/LKM menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kecuali yang berbadan hukum koperasi.

Tabel 2.60. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha mikro & kecil	4.402	3.077	2.280	4.701	5.449
2	Jumlah seluruh UKM	4.451	3.132	4.286	4.867	5.617
3	Persentase usaha mikro dan kecil	98,90%	98,24%	53,20%	96,59%	97,01%

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan, 2021

11) Penanaman modal

Urusan penanaman modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah ada kegiatan investasi di daerah namun belum optimal dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam.

Pada tahun 2020 terdapat lima investor skala Provinsi Maluku Utara yang menanamkan modal di Kota Tidore Kepulauan adalah PT. Energi Bersih Halmahera (Perkebunan & Industri), PT. Balibungan Utama (Barang & Jasa), PT. Hijrah Nusantara (Barang & Jasa), Warga Topo Prima (Barang & Jasa), Tidore Utama (Barang & Jasa) dan PT. Data Teknik Swaguna (Barang & Jasa).

Kegiatan investasi ini juga dipengaruhi oleh isu nasional dan global, misalnya pandemi Covid-19 yang dimulai tahun 2020. Hal tersebut terlihat pada data berikut.

Tabel 2.61. Capaian Kinerja Potensi Ekonomi

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2	2	1	5	5
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Milyar Rupiah)	25	30	20	37	27

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan, 2021

12) Kepemudaan dan olah raga

- Urusan kepemudaan dan olahraga perkembangannya belum begitu menggembirakan namun begitu ada beberapa atlet yang berprestasi tingkat nasional yaitu dari cabang olahraga pencak silat. Untuk bidang kepemudaan terdapat siswa dan siswi tingkat SLTA di Kota Tidore Kepulauan yang berhasil mewakili Provinsi Maluku Utara menjadi tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibaraka) di Istana Negara.

Tabel 2.62. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	1	5	5	5	5
2	Jumlah Penduduk	111.097	111.431	113.485	114.748	115.089
3	Presentase Gelanggang/Balai Remaja	0,0009	0,0045	0,0044	0,0043	0,0043

Sumber: Dispora Kota Tidore Kepulauan

- Lapangan olahraga

Tabel 2.63. Jumlah Lapangan Bola Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lapangan Bola Kaki	61	61	61	61	61

Sumber: Dispora Kota Tidore Kepulauan

13) Statistik

Produk-produk statistik diantaranya adalah :

- Buku "Kota Tidore Kepulauan dalam angka" selama periode sebelumnya sampai dengan tahun 2020 selalu tersedia setiap tahun. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Tidore Kepulauan dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
- Buku PDRB Kota Tidore Kepulauan sampai dengan 2020 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan.

14) Persandian

Kewenangan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Dalam realisasinya, pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah belum menerapkan pola komunikasi sandi.

Selain hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka urusan ini memiliki keterkaitan dengan keamanan cyber. Dimana segala perangkat aplikasi yang menggunakan teknologi informasi harus terjamin keamanan dari setiap upaya peretasan.

Sampai saat ini, sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan untuk menangani keamanan cyber belum tersedia. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang harus diselesaikan pada lima tahun mendatang.

15) Kebudayaan

Makna dari pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah derasnya arus informasi dan pengaruh budayaglobal.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terselenggarakan 2 festival seni dan budaya, 2 sarana seni dan kebudayaan, serta terpelihara 11 situs benda dan cagar budaya seperti dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64. Daftar Penyelenggaraan Seni dan Budaya Skala Kota/Kabupaten yang Dikelola Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1	Ritual Adat Akedango	Kelurahan Gurabunga	Hanya terdapat dua penyelenggaraan seni dan budaya skala Kota/Kabupaten yang dikelola Kota Tidore Kepulauan pada Tahun 2020 karena situasi pandemi Covid-19
2	Ritual Pembacaan Doa (Ratib Hadad)	Kelurahan Soasio	

Sumber: Disbudpar Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.65. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

No	Nama Sarana	Lokasi	Keterangan
1	Lapangan Gurua	Kelurahan Gurabunga	Tempat prosesi Ritual Adat Akedango
2	Kadato Kie Kesultanan Tidore	Kelurahan Soasio	Tempat prosesi Ritual Adat pembacaan doa selamat puncak peringatan Hari Jadi Tidore

Sumber: Disbudpar Kota Tidore Kepulauan, 2021

Tabel 2.66. Daftar Situs, Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang Dikelola Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020

No.	Nama Situs Benda dan Kawasan Cagar Budaya	Luas	Lokasi	Keterangan
1	Monumen Sebastian de Elkan	384 m ²	Kel.Rum Balibunga Kec.Tidore Utara	Tempat pendaratan pertama bangsa Spanyol yang dipimpin Juan Sebastian de Elkan beserta awak kapal Trinidad de Victoria di Pulau Tidore pada tanggal 8 N0vember
2	Benteng Tahula		Kel. Soasio Kec. Tidore	Benteng peninggalan bangsa Spanyol Pembangunan benteng ini berlangsung dari 1610 hingga 1615
3	Benteng Tore	2.250 m ²	Kel. Soasio Kec. Tidore	Benteng peninggalan bangsa Portugis yang dibangun tahun 1578 oleh Portugis atas perintah sancho de Vasconcelos yang mendapat ijin dari Sultan Gapi
4	Kompleks Makam Para Sultan Tidore		Kel. Soasio Kec. Tidore	Tempat Makam para Sultan Kerajaan Tidore antara lain: Sultan Mutahuddin M.tahir 9Sultan ke 32),Imam jawa konora (anak cucu Sunan Giri)
5	Makam Sultan Nuku	56 m ²	Kel. Soasio Kec. Tidore	Sultan Tidore ke 30 berkuasa tahun 1797 M -1805 M
6	Makam Sultan Zainal Abidin Syah	30 m ²	Kel. Soasio Kec. Tidore	Sutan Tidore ke 37,berkuasa tahun 1947-1967 M .Pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Barat yang pertama
7	Makam Sultan Jamaluddin (Criliyati)	375 m ²	Kel. tongowai Kec.Tidore Selatan	Sultan Tidore ke 11 berkuasa tahun 1495-1512 M
8	Makam Sultan Syarifuddin Syah	25 m ²	Kel.Soasio Kec.Tidore	Sultan Tidore yang ke 22, berkuasa thn 1657-1674,bergelar kecil Gulofino/Joukota
9	Kedaton Sultan Tidore	12.780 m ²	Kel.Soasio Kec.Tidore	Dibangun sekitar tahun 1660 M,direkonstruksi kembali Tahun 1998 .
10	Mesjid Kesultanan Tidore		Kel.Soasio Kec.Tidore	Pertama kali dibangun pada tahun 1700 M dan telah mengalami 4 kali renovasi
11	Dermaga Kesultanan Tidore	375 m ²	Kel.Soasio Kec.Tidore	Pertama kali dibangun secara permanen pada masa Sultan Zainal Abidin Syah

Sumber: Disbudpar Kota Tidore Kepulauan, 2021

16) Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun dimana terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2016 ke tahun 2019. Trend ini menunjukkan semakin meningkatnya minat baca masyarakat Tidore Kepulauan ditengah maraknya e-book di dunia maya.

Koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan daerah yang terdiri dari karya-karya umum, filsafat dan psikologi, Agama, Ilmu-ilmu Sosial, Bahasa, Sains, Teknologi, Seni Rekreasi Olahraga, Kesusasteraan dan Sejarah ilmu bumi biografi.

Tabel 2.67. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	2.771	3.58	5.448	5.680	808
2	Rasio Perpustakaan persatuan Penduduk	14,8	15,4	16,11	16,12	16,33

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore kepulauan, 2021

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Meningkatnya jumlah pengunjung karena adanya kunjungan dari sekolah-sekolah mulai dari Tingkat Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, Universitas dan Masyarakat. Selain itu juga mobil operasional Layanan Perpustakaan Keliling yang berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, menambah wawasan dan meningkatkan minat baca.

Pada Tahun 2020 jumlah pengunjung /pemustaka perpustakaan terjadi penurunan yang signifikan karena kami bidang layanan di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membatasi pengunjung /pemustaka di perpustakaan umum daerah maupun Operasional mobil perpustakaan keliling yang berkunjung di sekolah dan masyarakat di batasi disebabkan karena pandemi Covid-19.

Pengukuran terhadap capaian indicator Rasio perpustakaan persatuan penduduk dalam sasaran meningkatnya jumlah perpustakaan dimaksudkan untuk mengembangkan perpustakaan yang ada di Kota Tidore kepulauan mencapai 16,33 % (persen). Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan pendataan dan pembinaan perpustakaan yang ada di kota Tidore Kepulauan .Jumlah Perpustakaan tahun 2020 sebanyak 188 terdiri dari perpustakaan sekolah Dasar,SLTP,SLTA, Perguruan Tinggi dan Rumah Baca /Taman Baca yang ada di beberapa Kelurahan maupun Desa.

17) Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis. Namun hasilnya, belum seluruh organisasi Perangkat Daerah menerapkan arsip secara baku.

Capaian kinerja bidang kearsipan tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.68. Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase perangkat Daerah yang menerapkan Arsip secara baku (%)	35,4	55,2	60,2	60,2	60,2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota TidoreKepulauan, 2021

Jumlah OPD yang telah mengelola arsip secara baku masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 23 OPD artinya belum terjadi peningkatan di Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena di Tahun 2020 belum adanya program kegiatan pembinaan secara khusus yang sasarannya ke setiap OPD. Kegiatan di Tahun 2020 masih difokuskan pada kegiatan pembuatan instrument dasar kearsipan yang nantinya dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pengelolaan arsip di lingkungan kerja pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) *Pariwisata*

Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi pengembangan pariwisata, karena memiliki daya tarik wisata sejarah dan budaya, daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata buatan.

Daya tarik wisata budaya, antara lain : Lufu Kie, Legu Gam, Dabus, Mandi Safar di Mafututu, Salai Jin; Barang masuwen (bambu gila), Tari-tarian adat, Legu Dou dan Paca Goya.

Untuk wisata sejarah, daya tariknya antara lain : Kedaton Kesultanan di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Masjid Kesultanan Tidore di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Jembatan Kesultanan Tidore di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Benteng Tahula di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Benteng Tore di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Museum Sonyine Malige di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Makam Sultan Nuku di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Makam Sultan Zainal Abidin Syah di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Rumah Adat Tidore di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Kerajinan Tenun di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore, Kadato Gimalaha Tomayou di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore, Makam Habib Umar Al'Farook Rahmatullah di Kelurahan Seli Kecamatan Tidore, Kerajinan Bambu di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore, Bekas Kediaman Gubernur Irian Barat di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore, Rumah Adat Sowohi di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore, Makam Sultan Djamaluddin di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan, Makam Cililiyati di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan, Makam Jou Kota di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan, Kedaton Biji Nagara di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan, Kerajinan pandai besi di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan, Kerajinan gerabah di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan, Barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di perairan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan, Tugu Sebastian De Elcano di Kelurahan Rum Balibuga Kecamatan Tidore Utara, Benteng Maresku di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara, dan Kerajinan Bambu di Kelurahan Fobaharu Kecamatan Tidore Utara.

Sementara kawasan yang memiliki daya tarik wisata alam antara lain : Pulau Maitara di Kecamatan Tidore Utara, Pantai Rum di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara, Pantai Tahua di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara, Pantai Ake Sahu di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur, Pantai Taman Cobo di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur, Pantai Cobo di Kelurahan Jiko Cobo Kecamatan Tidore Timur, Pantai Gamgau Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur, Pulau Failonga di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur, Air Terjun Luku Celeng di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur, Geowisata Kalaodi dan Talaga di Kecamatan Tidore Timur, Geowisata Gurabunga di Kecamatan Tidore, Pantai Tugulufa di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore, Pulau Mare di Kecamatan Tidore Selatan, Laguna Gurua Marasai di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, Gugusan Pulau Woda, Pulau Raja, Pulau Guratu, Pulau Tameng dan Pulau Joji di Kecamatan Oba Tengah dan Kecamatan Oba, Air Terjun Bay Rorai di Desa Woda Kecamatan Oba, Air Terjun Sigela di Desa Sigela Kecamatan Oba, Air Terjun Havo di Desa Koli Kecamatan Oba, Resort burung di Desa Koli Kecamatan Oba, Spot selam di Pulau Maitara, Tanjung Rum Bune, Tahua, Jiko Cobo, Akesahu, Pulau Failonga, Cobodoe, Trikora, Tugulufa, Kotamabopo, Tanjung Soasio, Soadara, Tongowai, Pulau Mare, Pasi, Pulau Woda, Pulau Raja, Pulau Guratu, dan Pulau Joji, dan Agrowisata di Kelurahan Gurabunga, Lada Ake, Kalaodi, Talaga, Jaya, Transmigrasi Kosa dan Transmigrasi Maldi.

Untuk kawasan yang memiliki daya tarik wisata buatan antara lain :kawasan wisata Rum yang terintegrasi dengan kawasan olahraga, pengembangan kawasan pantai Tugulufa, dansuaka paruh bengkok di Desa Koli sebagai pusat edukasi dan pelestarian burung paruh bengkok khas Maluku Utara.

Dengan potensi daya tarik wisata yang demikian banyak, belum sebanding dengan jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.69. Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata (Orang)	18.872	19.084	27.550	28.363	8.019
2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	1	1	1	1	1

Sumber: Disparbud Kota TidoreKepulauan, 2021

Rata-rata lama kunjungan wisatawan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya satu hari. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya prasarana akomodasi seperti hotel.

2) Pertanian

Sektor pertanian sangat berperan penting dalam perekonomian di daerah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PDRB sektor ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang berkisar antara 23,77 persen sampai 25,78 persen. Kontribusi terbesar bersumber dari sub sektor perkebunan yang mencapai 20,52 persen di tahun 2020. Sumbangan sub sektor pangan dan hortikultura terbilang kecil, yakni 2,75 persen di tahun 2020.

Tabel 2.70. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (2016 – 2020)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Tidore Kepulauan	25,36	27,55	26,05	26,82	23,77
2	Kontribusi sub Sektor Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB Pertanian	5,50	5,95	2,17	2,77	2,75
3	Kontribusi sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Pertanian	12,65	13,69	13,48	14,87	20,52

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021

Hal ini setidaknya dapat tergambar dari data luas lahan dan produksi sektor ini sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.71. Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan, Sayuran, Buah-buahan dan Tanaman Perkebunan di Kota Tidore Kepulauan

Jenis	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Luas Panen (ha)	Prod (Ton)								
Tanaman Pangan	409,11	4384,56	1224,05	6861,82	24490,23	5631,8	10071,45	26517,5	3634,45	2702,81
Sayuran	6640,95	31789,87	711,43	14757,94	616	7166	752	7855	515	3363
Buah-buahan	1337,65	10203,71	11929,92	7736,76	23972,35	23421	23922,53	50998	65130	1152248
Tanaman Perkebunan	17975,16	13541,76	13791,45	11755,23	15014,5	12645,6	15930,5	11663,6	16409,6	3135
	26362,87		27656,85		64093,08		50676,48		85689,05	

Sumber : Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021, diolah

Tanaman pangan berupa padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, dan sukun. Sementara sayuran dalam data tersebut terdiri dari : tomat, cabe, bawang merah, Caisin/Petsai/Sawi, Kacang Panjang, ketimun dan terong. Untuk buah-buahan berupa : alpukat, durian, mangga, jeruk, rambutan, pisang, nangka, papaya dan buah naga. Semntaran untuk tanaman perkebunan yang dimaksud terdiri atas : kelapa, cengkeh, pala, coklat, enau, kayu manis dan sagu.

Tanaman perkebunan masih merupakan idola sebagian besar petani di Kota Tidore Kepulauan. Data Luas areal dan produksi tanaman perkebunan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.72. Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan

Jenis Komoditi	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Luas Panen (ha)	Prod (Ton)								
Kelapa	8574,21	10714,33	8541	9555,6	8741	9555,6	8841	9555,6	8845,5	9,572.5
Cengkeh	1420,2	1288,2	1156,9	267	1156,9	267	1156,9	267	1178,9	270.7
Pala	7603,55	1.222	3.585,4	1.773	4667,4	2.755	5483,4	1.773	5759,8	3.135
Coklat	281,4	57,4	412,5	68	412,5	68	412,5	68	46,3	91,0
Enau/ Gula	49,6	214,73	39,70	40,81	36,7	-	36,7	-	15,3	5,8
Kayu Manis	0,4	20,5	8,10	10,50	-	-	-	-	3,8	1,1
Sagu	45,8	24,6	47,85	40,32	-	-	-	-	560	24.25

Sumber : Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021, diolah

Sementara dari sub sektor peternakan, populasi ternak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sangat mendukung isu ketahanan sebagai bagian dari isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Tabel 2.73. Jumlah Populasi dan Produksi Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi	8395	9161	10102	10.632	11.377
Kambing	9790	10500	12434	14.330	15.763
Ayam Buras	83097	95658	119443	136.788	176.524
Itik	4290	5757	7316	9.185	11.941

Sumber : Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021, diolah

3) Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap nelayan Kota Tidore Kepulauan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2016, produksi perikanan tangkap adalah 15.896 ton/ tahun menjadi 21.008 per ton/tahun pada tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan produksi rata-rata 6,4 persen per tahun.

Berbeda dengan perikanan tangkap, untuk produksi perikanan budidaya justru mengalami penurunan yang signifikan. Yakni dari 46 ton/ tahun di tahun 2016 menjadi 12,40 ton pada tahun 2020. Atau persentase rata-rata penurunannya sebesar -92 persen. Jenis komoditi ikan yang dibudidayakan adalah ikan nila, kerapu, bandeng, mas dan udang vanamae.

Produksi pengolahan hasil perikanan juga mengalami peningkatan, yakni dari 5.349 Ton pada tahun 2016, menjadi 7.200 ton pada tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan produksi 7,15 persen per tahun.

Tabel 2.74. Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	15.896	15.912	16.985	17.100	21.008	6,4
Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	46	51	10,25	13	12,40	-92
Volume Olahan (Ton/Thn)	5349	5720	6.235	6.850	7.200	7,15

Sumber : DKP Kota Tidore Kepulauan (2021)

Merujuk pada data tersebut, terlihat bahwa rata-rata 36,1 persen produksi perikanan ditingkatkan nilai tambahnya dengan jalan melakukan pengolahan hasil perikanan dalam bentuk ikan asap (ikang fufu), maupun abon ikan (garampati).

Produksi Perikanan Tangkap ditunjang oleh prasarana perikanan tangkap berupa kapal perikanan yang jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.75. Jumlah dan Jenis Kapal Perikanan

Jenis Kapal	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perahu Tanpa Motor	620	630	650	690	717
Motor Tempel	395	434	464	534	578
Kapal Motor	50	55	60	65	70

Sumber : DKP Kota Tidore Kepulauan (2021)

Naikannya produksi juga dibarengi dengan meningkatnya konsumsi ikan per kapita per tahun masyarakat Kota Tidore Kepulauan, yakni 52,62 kg per kapita per tahun di tahun 2016, menjadi 57,52 kg per kapita per tahun pada 2020. Angka pertumbuhan rata-rata adalah 1,23 kg per tahun.

Tabel 2.76. Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun

Konsumsi Ikan	Tahun					Rata Pertumbuhan (kg)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun	52,62	54,62	55,89	56,93	57,52	1,23

Sumber : DKP Kota Tidore Kepulauan (2021)

2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang saat ini telah memasuki tahap terakhir (IV) untuk tahun 2021-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang nantinya akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan untuk jangka 5 tahun ke depan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Selanjutnya perencanaan ini akan dijabarkan pelaksanaannya setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dalam pelaksanaannya, semua dokumen perencanaan dapat dirumuskan dan disusun sesuai kaidah penyusunannya. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain masih belum fokusnya perencanaan pembangunan, tingkat keselarasan antara dokumen induk (RPJPD dan RPJMD) dengan penjabarannya ke dalam Renstra-PD yang masih rendah., serta tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum perumusan dokumen perencanaan seperti musrenbang yang masih perlu ditingkatkan

2) Keuangan

Dalam urusan keuangan Kota Tidore Kepulauan termasuk salah satu dari delapan Kabupaten/Kota yang pengelolaan keuangannya termasuk baik ini dibuktikan dengan diraihnya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) "Wajar Tanpa Pengecualian" selama lima tahun terakhir. Sementara untuk persentase SILPA terhadap APBD berkisar dibawah 10%, untuk persentase belanja pendidikan terhadap APBD realisasinya diatas 20%, untuk persentase belanja kesehatan terhadap APBD persentasenya diatas 18% serta waktu penetapan APBD selalu tepat waktu.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sampai dengan tahun 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan berjumlah 3.866 orang. Dari jumlah tersebut, terbanyak adalah fungsional guru, yakni 1.507 atau 39 persen, dan paling sedikit adalah sebagai Fungsional Tertentu Lainnya, yakni sebanyak 29 orang.

Tabel 2.77. Jumlah ASN Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Pimpinan Tinggi Pratama	35	35	36
2	Administrator	141	149	149

3	Pengawas	515	524	531
4	Fungsional Umum / Pelaksana	1.058	1031	1033
5	Fungsional Guru	1.494	1477	1507
6	Fungsional Kesehatan	478	467	520
7	Fungsional Penyuluh	80	73	73
8	Fungsional Tertentu Lainnya	33	24	29
Jumlah		3834	3780	3866

Sumber : BPSDM Kota Tidore Kepulauan, 2020

Sementara berdasarkan pangkat, komposisi ASN yang berpangkat Penata (III.c) adalah yang tertinggi, yakni 21,7 persen. Dan yang paling sedikit adalah Juru Muda Tk I, yakni sebanyak 1 orang sekaligus merupakan pangkat terendah ASN Kota Tidore Kepulauan pada Tahun 2019.

Tabel 2.78. Jumlah ASN Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Juru Muda	I/a	2	1	1	0
2	Juru Muda Tk I	I/b	1	1	1	1
3	Juru	I/c	15	9	9	6
4	Juru Tk I	I/d	3	1	1	2
5	Pengatur Muda	II/a	97	101	78	39
6	Pengatur Muda Tk I	II/b	165	158	146	116
7	Pengatur	II/c	230	255	224	255
8	Pengatur Tk I	II/d	261	256	226	189
9	Penata Muda	III/a	490	508	464	516
10	Penata Muda Tk I	III/b	887	817	731	691
11	Penata	III/c	595	618	760	837
12	Penata Tk I	III/d	538	543	566	684
13	Pembina	IV/a	495	425	419	388
14	Pembina Tk I	IV/b	87	112	125	116
15	Pembina Utama Muda	IV/c	25	27	25	23
16	Pembina Utama Madya	IV/d	2	2	2	3
17	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	0
JUMLAH			3.893	3.834	3.780	3.866

Sumber : BPSDM Kota Tidore Kepulauan, 2020

Sementara jumlah ASN jika diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, maka ASN lulusan S1/sarjana adalah yang menempati komposisi tertinggi atau 63 persen. Dan paling sedikit adalah yang berpendidikan S3 (Doktoral) yakni sebanyak 3 orang. Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah 7 orang ASN yang masih berpendidikan Sekolah Dasar.

Tabel 2.79. Jumlah ASN Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SD	6	10	10	7
2	SMP/SLTP/MTS	22	13	12	12
3	SMA/SLTA/SMK/ALIAH	806	749	713	690
4	D.I	14	17	16	14
5	D.II	312	292	294	282
6	D.III	310	345	301	295
7	D.IV	47	53	53	51
8	S.1	2.263	2.173	2234	2419
9	S.2	110	109	104	93
10	S.3	3	3	3	3
JUMLAH		3.893	3834	3780	3.866

Sumber : BPSDM Kota Tidore Kepulauan, 2020

4) Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan yang belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, dari evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa hampir disemua OPD belum memanfaatkan peran perguruan tinggi yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk bersama-sama membuat penelitian yang berhubungan dengan urusan kerja masing-masing yang dapat melahirkan inovasi program dan kegiatan.

5) Pengawasan

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya. Salah satu fungsi yang dijalankan melalui Inspektorat adalah melaksanakan tindak lanjut temuan, dari capaian kinerja selama lima tahun terakhir mencapai nilai diatas 90% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

No	Uraian	2019	2020*)
1	selesai	93,84	91,89
2	belum selesai	5,43	7,52
3	belum ditindaklanjuti	0,48	0,38
4	tidak dapat ditindaklanjuti	0,24	0,24
Jumlah		100	100

Keterangan *) sampai dengan semester 1 Tahun 2020

Sumber : Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, 2020

Selain tindak lanjut selesai, salah satu capaian terkait pengawasan adalah tingkat kematangan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di Kota Tidore Kepulauan tahun 2017 – 2020 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.81. Capaian Kematangan SPIP Kota Tidore Kepulauan

No	Uraian	2017	2020
1	Tingkat Kematangan SPIP	Level 3	Level

Sumber : Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, 2020

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Capaian kematangan SPIP Level 3 atau terdefenisi memiliki arti bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan praktik pengendalian interen dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian interen dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Tabel 2.82. Realisasi Kinerja Per Urusan tahun 2017-2020

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja				Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1.	Otonomi daerah pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah ,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,00	6,03	6,43	1,99	<
1.1.1.2.	Laju Inflasi	1,97	4,12	2,02	2,19	Terkendali
1.1.1.3.	PDRB per Kapita	24,57	26,52	28,59	29,08	>
1.1.1.4	Indeks Gini (%)	0,23	0,30	0,26	0,31	=
1.1.1.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,25	69,89	70,83	70,53	>
1.1.1.6.	Presentase Penduduk di atas garis kemiskinan (%)	5,45	5,95	6,1	6,52	<
1.1.1.7.	Presentase PAD terhadap APBD	6,5	6,24	7,1	9,66	<
1.2.	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Pendidikan					
1.2.1.1	Angka Melek Huruf	99,98	99,99	99,99	98,70	=
1.2.1.2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,39	13,91	14,20	14,31	<
1.2.1.3.	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,64	68,87	69,22	69,34	<
1.2.1.4.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)					-
1.2.1.5.	Tingkat partisipasi angkatan Kerja (%)	60,89	65,16	65,11	67,07	<
1.2.1.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,95	4,97	4,65	4,95	<
1.2.1.7.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	64,87	61,71	29,79	60,64	>
	PELAYANAN UMUM					
2.1	Pelayanan Urusan Pemerintahan wajib					
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.1.1.	Pendidikan					
2.1.1.1.	Pendidikan Dasar					
2.1.1.1.	Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)(%)	88,41	79,68	79,45	75,01	=
2.1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK SD/MI/Paket A(%)	100,27	101,41	101,91	105,91	>
	APK SMP/MTs/Paket B(%)	90,15	92,49	92,25	85,24	<
2.1.1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan:					
	Tamat SD	22,05	22,08	21,68	21,68	<
	Tamat SMP	13,66	13,32	12,97	13,05	<
2.1.1.4.	Angka Partisipasi Murni (APM) :					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,42	92,35	89,18	84,28	<
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69,18	78,51	69,54	60,77	<

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja				Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	
2.1.1.5.	Angka Partisipasi Sekolah					
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MIN/Paket A	89,42	92,35	89,18	84,28	<
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	69,18	78,51	69,54	60,77	<
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah :					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,11	0,00	0,01	0,07	>
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,09	0,00	0,02	0,23	>
2.1.1.7.	Angka Kelulusan :					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	=
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,9	100	100	100	=
2.1.1.8.	Angka Melanjutkan (AM):					
	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	102,99	97,58	98,39	106,48	>
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	102,41	77,95	Data di Provinsi	Data di Provinsi	-
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan :					
	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik(%)	92,08	77,23	91,09	90,2	>
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	89,23	72,97	81,08	81,08	>
2.1.1.10	Rasio guru /murid sekolah pendidikan dasar	74,25	75,00	75,67	95,91	>
2.1.1.11.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	74,36	74,26	74,36	115,61	>
2.1.1.12.	Rasio guru /murid per kelas rata- rata sekolah dasar	12,36	12,50	12,61	15,98	>
2.1.1.13.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	24,69	24,75	24,78	38,53	>
2.1.1.14.	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,98	99,99	99,99	99,99	=
2.1.1.15.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	84,08	84,04	86,05	53,05	<
2.1.2.	Kesehatan					
2.1.2.1	Pelayanan kesehatan ibu hamil memenuhi standar (%)	75	78,6	87	87,8	<
2.1.2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin memenuhi standar (%)	78	82,1	87,8	86,6	<
2.1.2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir memenuhi standar (%)	79	90,5	90,1	89,1	<
2.1.2.4	Pelayanan kesehatan balita memenuhi standar (%)	68	86	85,7	79,7	<
2.1.2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar memenuhi standar (%)	93	97,1	100	89,9	<
2.1.2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif memenuhi standar (%)	9	78,6	87,8	72	<
2.1.2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut memenuhi standar (%)	45	77,9	96,8	76,7	<
2.1.2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi memenuhi standar (%)	24	80	98,1	89	<

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja				Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	
2.1.2.9	Pelayanan kesehatan diabetes melitus memenuhi standar (%)	14	60,8	99,1	88	<
2.1.2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat memenuhi standar (%)	100	100	98,5	90,3	<
2.1.2.11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB memenuhi standar (%)	84	74,3	100	58,20	<
2.1.2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV memenuhi standar	25	40	91,8	82,5	<
3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A	Pekerjaan Umum:					
3.1.3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	61,85	65,20	72,87	70,31	<
3.1.3.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	88,30	90,95	91,95	93,12	>
3.1.3.3	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	65	70	75	79,82	=
3.1.3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	82,65	100	100	100	=
3.1.3.5	Rasio Jaringan Irigasi	1,77	1,78	5,11	0,16	<
3.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum (%)	78,47	84,75	87,67	88,59	<
3.1.3.7	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0,05	0,04	0,03	0,01	<
B	Penataan Ruang:					
3.1.8	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,008	0,006	0,005	0,005	<
3.1.9	Ketaatan terhadap RTRW (%)	50	50	51,43	82	>
3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
3.1.4.1	Rasio rumah layak huni	0,15	0,18	0,21	0,25	=
3.1.4.2	Rasio permukiman layak huni	0,90	0,92	0,94	0,99	=
3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
3.1.5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	75	80	93	100	=
3.1.5.2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	70	75	60	92,5	>
3.1.5.3	Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	60	80	>
3.1.6	Sosial					
3.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	80	80	90	98	<
3.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	80	80	85	98	>
3.1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	70	70	80	90	=
3.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	0,0	0,0	-	-

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja				Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	
3.1.6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	0,11	0,05	0,11	0,12	<
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
3.2.1	Tenaga Kerja					
3.1.2.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	50,08	50,14	27,06	100	<
3.1.2.2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	15,14	21,08	12	-	-
3.1.2.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	16,20	17,02	0,02	0,08	<
3.1.2.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	56,02	52,81	0,45	-	-
3.1.2.5	Rasio lulusan S1/S2/S3	13,70	15,60	10,3	7,92	<
3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
3.2.2.1	Rasio KDRT	0,02	0,3	0,009	48,95	<
3.2.2.2	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	50,21	45,92	45,92	48,95	<
3.2.2.3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	=
3.2.2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	=
3.2.2.5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	9	100	100	=
3.2.2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0	14	100	100	=
3.2.3	Pangan					
3.2.3.1	Ketersediaan pangan utama (%)	14,07	14,28	44	98	>
3.2.3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	14,07	14,28	16	82	<
3.2.4	Pertanahan					
3.2.4.1	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100	100	100	-	=
3.2.5	Lingkungan Hidup					
3.2.5.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	=

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja				Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	
3.2.5.2	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	100	100	80	100	=
	di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan					
	dampaknya di Daerah kabupaten/kota. (%)					
3.2.5.3	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	11.075,11	12.018,64	12.806,51	12.542	=
3.2.5.4	Persentase cakupan area pelayanan (%)	3,21	7,48	20,92	20,42	<
3.2.5.5	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	68,08	73,87	77,73	74,86	=
3.2.5.6	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/ Kota (Unit)	47	47	50	50	<
3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
3.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	77,61	90,67	91,79	69,15	<
3.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	78,14	96,97	96,39	97,07	<
3.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	82,71	84,10	91,62	28,66	<
3.2.6.4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	81,75	92,97	99,57	96,07	<
3.2.6.5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	89,72	90,00	95,23	82,4	>
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
3.2.7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	2	89	>
3.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	2	2	3	104	>
3.2.7.3	Persentase LPM Berprestasi (%)	1,12	3	3	3,56	>
3.2.7.4	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	>
3.2.7.5	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	>
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
3.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	1,15	1,08	2,8	0,12	Terkendali
3.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,7	2,5	2,6	3,1	>
3.2.8.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,8	2,6	2,5	3	>
3.2.8.4	Ratio Akseptor KB	7,15	82	75,2	89	>
3.2.8.5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	53,7	48,2	36	40	>
3.2.9	Perhubungan					
3.2.9	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	825.3	866.565	774	834	<
3.2.9.1	Rasio ijin trayek (%)	100	100	-	100	=
3.2.9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	422	464	418	230	<
3.2.9.3	Persentase layanan angkutan darat	0,51	0,53	0,56	0,78	>
3.2.9.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0,03	0,02	0,01	0,40	>
3.2.9.5	Jumlah pelabuhan laut/ terminal	7	7	3	1	<
3.2.10	Komunikasi dan Informatika					

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja				Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	
3.2.10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	76	78	78	78	>
3.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah					
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif (%)	68,85	68,55	70,16	68,85	<
3.2.11.2	Persentase Usaha Mikro (%)	26,88	20,80	21,28	-	-
3.2.12	Penanaman Modal					
3.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	60	20	5	5	=
3.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp Milyar)	30	20	37,5	27	<
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga					
3.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	69,56	41,6	62	20	<
3.2.13.2	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	121	138	146	148	>
3.2.14	Statistik					
3.2.14.1	Buku "kabupaten dalam angka"	1	1	1	Belum	-
3.2.14.2	Buku "PDRB"	1	1	1	Belum	-
3.2.15	Persandian					
3.2.15.1	Perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	47	47	47	47	<
3.2.16	Kebudayaan					
3.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	8	8	2	<
3.2.16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	=
3.2.17	Perpustakaan					
3.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	1.511	5448	6.68	808	=
3.2.17.2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	15,4	16,11	16,12	16,13	>
3.2.18	Kearsipan					
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	55,2	60,2	71	60,2	<
3.3	Layanan Urusan Pilihan					
3.3.1	Pariwisata					
3.3.1.1	Kunjungan wisata (Orang)	19.084	27,550	28,363	15,703	<
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	1	1	1	1	=
3.3.2	Pertanian					
3.3.2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	25,85	25,85	26,82	23,77	<
3.3.2.2	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	2,13	2,17	2,77	2,75	>
3.3.2.3	Kontribusi sub sektor perkebunan tahunan terhadap PDRB (%)	13,35	13,48	14,87	20,25	>
3.3.3	Perdagangan					
3.3.3.1	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (%)	0	25,2	48,8	261,28	>
3.3.3.2	Koefisien variasi harga antar waktu (%)	4,00	1,36	1,26	2,92	=

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja				Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	
3.3.4	Perindustrian					
3.3.4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	65	46	56,53	19,73	>
3.3.5	Transmigrasi					
3.3.5.1	Persentase transmigran swakarsa (%)	0	0	0	0	-
3.3.6	Kelautan dan Perikanan					
3.3.6.1	Produksi perikanan (Ton/tahun)	17.985	18.775	16.89	21.02	>
3.3.6.2	Konsumsi ikan (Per kapita per tahun)	54,62	55,89	54,20	57.52	>
3.4	Penunjang Urusan					
3.4.1	Perencanaan Pembangunan					
3.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3.4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd (%)	70	90	90	-	-
3.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD (%)	70	90	90	-	-
3.4.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	50	50	50	-	-
3.4.2	Kuangan					
3.4.2.1	Persentase belanja pendidikan (%)	22,09	19,28	22,24	22,91	>
3.4.2.2	Persentase belanja kesehatan (%)	19,76	21,27	28,82	22,02	>
3.4.2.3	Penetapan APBD (Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	=
3.4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
3.4.3.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	4,3	4,76	7,91	8	=
3.4.3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	20,03	24,08	25,5	5,5	<
3.4.4	Penelitian dan pengembangan					
3.4.4.1	Penerapan SIDA:	2	3	3	2	>
3.4.4.2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)	-	-	30	-	-
3.4.5	Pengawasan					
3.4.5.1	Persentase tindak lanjut temuan	92,89	88	90,24	92,71	=
3.4.6	Sekretariat Dewan					
3.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	=

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja				Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	
3.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	=

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

- Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang ada di Kota Tidore Kepulauan ada mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari pendapatandi tahun 2019 sebesar 19,90 juta per kapita per tahun meningkat menjadi 20,11 juta rupiah per kapita per tahun pada 2020. Disamping itu pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita juga mengalami pertumbuhan yang positif juga ini dapat dilihat dari pengeluaran pendapatan untuk makanan maupun pengeluaran pendapatan untuk non makanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83. Jumlah Konsumsi Per Kapita Kota Tidore Kepulauan 2019-2020

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Konsumsi Per Kapita	Jumlah Konsumsi Non Makanan	Jumlah Konsumsi Makanan
2019	21,453	1,042,786	510,624	532,162
2020	21,656	1,242,468	614,324	628,144

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021

- Keterbukaan dan Kecepatan Layanan Investasi/Perizinan

Perekonomian Kota Tidore Kepulauan masih dipengaruhi 3 sektor sebagaimana data tahun 2020 yaitu sector administasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social (39,14%), sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (23,77%), serta sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (10,98%). Peluang pengembangan investasi di Kota Tidore Kepulauan tidak saja didominasi oleh ketiga sektor diatas tetapi juga berlaku pada sector-sektor ekonomi lainnya,

pengembangan investasi terbuka pada semua pihak yang berniat menanamkan modalnya pada semua sector ekonomi yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Pada tahun 2020 terdapat lima investor bersekala regional yang menanam investasi senilai 27 milyar. Untuk mempermudah dan menarik investor menanamkan modalnya ada beberapa perizinan yang pengurusannya digratiskan seperti SIUP, SIUJK dan ijin lingkungan yang apabila persyaratannya lengkap bisa dikeluarkan tidak lebih dari lima hari.

Tabel 2.84. Capaian Realisasi Investasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2	2	1	5	5
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Milyar Rupiah)	25	30	20	37	27

Sumber : DPM dan PTSP, 2021

- Ketersediaan Lembaga Perbankan dan Keuangan
Perkembangan ekonomi dan investasi di Kota Tidore Kepulauan perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti tersedianya lembaga keuangan seperti bank. Bank-bank yang ada terdiri dari Bank Umum seperti: BRI, BNI 46, Bank Danamon dan BPD Maluku. Untuk Bank Umum Syariah adalah Bank Muamalat sedangkan Bank Perkreditan Rakyat yang ada adalah BPR Bobato Syariah.
Untuk lembaga keuangan lainnya seperti lembaga asuransi adalah Asuransi Jiwasraya dan Bumi Putra

Tabel 2.85. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2020

No.	Sektor	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bank Umum						
1.1	Konvensional	4	4	4	4	4	4
1.2	Syariah	-	1	1	1	1	1
2	BPR						
2.1	Konvensional	-	-	-			-
2.2	Syariah	-	-	1	1	1	1
	Jumlah	4	5	6	6	6	6

Sumber: BPD Maluku, 2021

Tabel 2.86. Jumlah Restoran, Kafe dan Rumah Makan Tahun 2019-2020

No.	Jenis Usaha	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Usaha Kafe	3	40	3	40
2	Usaha Restoran Gol Rendah	9	36	9	36
3	Usaha Rumah Makan	21	530	21	530

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Tabel 2.87. Jumlah Hotel dan Penginapan

No.	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Jumlah Hotel/ Penginapan	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel/ Penginapan	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	Hotel Bintang	1	24	24	1	24	24
2	Hotel Melati	2	13	13	2	13	13
3	Penginapan	23	220	220	23	220	220
	Jumlah	26	257	257	26	257	257

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Tabel 2.88. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Tahun 2015-2020

No	Sektor	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perusahaan Asuransi Jiwa						
1.1	Konvensional	2	2	2	2	2	2
2.2	Syariah	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	2	2	2	2	2

Sumber: BPD Maluku, 2021

- Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
 - Ketersediaan Daya Listrik

Tabel 2.89. Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Susut & Losses	%	9,74	5,02	6,74	7,28	1,96
2	Faktor Beban	%	74,35	75,45	74,8	78,34	78,65
3	Produksi	KWH	26,400,025	28,200,748	33,292,201	35,042,498	37,458,968
4	Beban Puncak	MW	4625	4810	4770	5100	5200
5	Kapasitas Terpasang (Existing)	MW	14552	14552	65700	55500	55500
Total Kapasitas Sistem		MW	11800	11800	33270	34460	35620
Daya yang dibutuhkan*		MW	4625	4810	4890	4955	5200

Sumber: PLN Tidore, 2021

Tabel 2.90. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	RT dengan daya 450 VA	5.812	5.712	5.399	5.196	5.071
2	RT dengan daya 900 VA	10.718	11.106	11.760	12.309	12.776
3	RT dengan daya 1.300 VA	1.835	2.314	2.537	2.738	2.8
4	RT dengan daya 2.200 VA	314	340	403	439	661
5	RT dengan daya > 2.200 VA	61	73	95	116	203
Total Rumah Tangga		18.74	19.545	20.194	20.798	21.511

Sumber: PLN Tidore, 2021

- Ketersediaan Tower/ BTS Jaringan Telekomunikasi (4G)

Dukungan sarana telekomunikasi di Kota Tidore Kepulauan terus mengalami peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah tower yang telah mencapai 48 buah, yang di kelola 4 perusahaan telekomunikasi nasional , walaupun jumlah tower yang bangun hampir diseluruh wilayah kecamatan namun untuk kualitas penerimaan sinyalnya belum merata pada semua desa dan kelurahan di Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 2.91. Jumlah Tower Telekomunikasi

No	Tower	Jumlah
1	Telkomsel	36
2	XL	9
3	Indosat	2
4	Telkom	1
Jumlah		48

Sumber: Dinas Kominfo, 2021

- Fokus Sumber Daya manusia

Kapasitas sumberdaya manusia di Kota Tidore Kepulauan terus ditingkatkan dalam rangka menyongsong persaingan baik ditingkat regional maupun tingkat nasional. Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia bisa dilihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 2.92. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kota Tahun 2018-2020

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota		
	2018	2019	2020
Halmahera Barat	64.54	65.34	65.31
Halmahera Tengah	64.66	65.55	65.42
Kepulauan Sula	62.96	63.64	63.53
Halmahera Selatan	63.39	64.11	63.84
Halmahera Utara	67.30	67.75	67.50
Halmahera Timur	66.20	66.74	66.75
Pulau Morotai	61.39	62.38	62.50
Pulau Taliabu	59.67	60.62	60.48
Ternate	79.13	80.03	79.82
Tidore Kepulauan	69.89	70.83	70.53
Maluku Utara	67.76	68.70	68.49

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Tabel 2.93. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2015 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak/Belum Sekolah	22.086	22.171	21.296	21.801	21.615
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	14.702	14.796	14.296	14.561	14.587
3	Tamat SD/Sederajat	24.439	24.981	25.063	24.956	24.971
4	SLTP/Sederajat	15.222	15.146	15.115	14.900	14.954
5	SLTA/Sederajat	24.978	24.786	26.625	27.186	27.335
6	Diploma II/Sederajat	1.358	1.283	1.217	1.148	1.128
7	Diploma III/Sederajat	1.069	1.105	1.311	1.325	1.379
8	Strata I / Seterusnya	6.987	7.222	8.223	8.505	8.753
9	Strata II/III	256	285	339	366	367
Total		111.097	111.775	113.485	114.748	115.089

Sumber: Dinas Capilduk, 2021

- Fokus Tingkat Keamanan

Tabel 2.94. Angka Kriminalitas Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Jenis Kriminal	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus Narkoba	4	7	1	3
2	Jumlah kasus Pembunuhan	1	-	1	-
3	Jumlah Kejahatan Seksual	12	-	1	7
4	Jumlah kasus Penganiayaan	12	12	7	3
5	Jumlah kasus Pencurian	7	5	2	5

6	Jumlah kasus Penipuan	3	-	1	2
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-

Sumber: Polres Tidore, 2021